

Perempuan Bergerak

bersatu bersama lawan tirani

Perempuan Potensial menuju Pemilu 2009

PROSES METAMORFOSA YANG SEDEMIKIAN PANJANG

Selamat atas terbitnya bulletin baru Yayasan Kalyanamitra, Perempuan Bergerak. Setelah melalui proses metamorfosa yang sedemikian panjang, kiranya hasil seduhan dan suguhan ini dapat semakin bermanfaat bagi segenap pejuang hak asasi manusia di seluruh penjuru nusantara...

Teruslah berjuang!

Rudy Fransiskus,
Staf Institut Dayakologi, Kalimantan Barat

Jawab:

Terima kasih atas dukungannya. Tujuan menerbitkan "Perempuan Bergerak" ini memberikan warna baru bagi kaum perempuan untuk bergerak.

BUKAN UNTUK PEREMPUAN SAJA

Selamat atas kehadiran bulletin Perempuan Bergerak, media informasi, pendidikan dan komunikasi yang dapat membangunkan kesadaran Perempuan. Kesadaran yang dengannya Perempuan dapat menembus batas-batas kekolotan budaya patriarchal peninggalan zaman feodal

Media ini diharapkan juga bukan hanya "untuk" perempuan, melainkan memang "milik" perempuan, yang memperlihatkan secara radikal ketidak-adilan struktural atas gender.

Akhirnya, dengan harapan yang selalu kita jaga bersama: "Perempuan di Dunia Bersatulah!!!"

Adrian Budi Sentosa
Staf. Divisi Pemantauan Impunitas KontraS

Jawab:

Budaya patriarchal memang dilestarikan oleh kapitalis untuk membungkam gerakan perempuan. Budaya patriarchal juga ditanamkan dari keluarga sampai sistem negara. Buletin "Perempuan Bergerak" menuntun dan menginformasikan kepada kaum perempuan untuk bergerak dan bersatu lawan tirani.

Terima kasih.

Penanggung Jawab: **Rena Herdiyani**; Pemimpin Redaksi: **Hegel Terome**; Redaktur Pelaksana: **Sulistiyono**; Redaksi: **Naning Ratningsih, Iha Sholihah, Listyowati, Nani Ekawaty, Rakhmayuni, Ika Agustina, Diana**; Reportase: **Wiwik (PMK), Leni (PMK), Silvia (PMK), Yani (PMD)**; Tata Letak : **Sulistiyono**; Distribusi : **Rakhmayuni**

Perempuan Bergerak merupakan media yang memuat pandangan-pandangan yang membangun kesadaran kritis kaum perempuan di seluruh Indonesia sehingga memberdayakan dan menguatkan mereka. Kekuatan bersama kaum perempuan yang terbangunkan itu merupakan sendi-sendi penting terdorongnya gerakan perempuan dan sosial umumnya untuk menuju masyarakat yang demokratis, setara, tidak diskriminatif dan tidak subordinatif.

Redaksi menerima kritik, saran dan sumbangan berupa surat pembaca, artikel dan foto jurnalistik. Naskah, artikel dan foto jurnalistik yang diterima redaksi adalah yang tidak anti demokrasi, anti kerakyatan, diskriminatif dan bias gender. Naskah tulis diketik pada kertas A4, spasi satu, huruf Arial 12, maksimal 3 halaman dalam bentuk file atau print-out.

Untuk pemasangan iklan di buletin, hubungi Redaksi perempuan.

Telp : 021-7902109

Fax : 021-7902112

Email : media@kalyanamitra.or.id

Alamat Redaksi : Jl. Kaca Jendela II No.9 Rawajati-Kalibata, Jakarta Selatan 12750. Telp : 021-7902109; Fax : 021-7902112; Email : ykm@indo.net.id; Website : www.kalyanamitra.or.id

Untuk berlangganan *Perempuan Bergerak* secara rutin, kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi.

Redaksi menerima sumbangan pengganti biaya cetak Rp. 10.000,- dan biaya pengiriman di rekening sesuai kota tujuan. Transfer ke Rekening Bank Bukopin Cabang Kalibata, No. Rekening 0103-034652 a/n. Rena Herdiyani.

Akhirnya Datang Juga !

Kawan-kawan kalyanamitra, lama buletin Kalyanamedia tidak terbit. Berbagai masalah menjadi kendalanya. Dan, melalui pergumulan yang panjang, akhirnya kami putuskan untuk menerbitkan buletin kami yang baru. Dengan media buletin ini, kami berharap bisa menghilangkan rasa kangen kawan-kawan kalyanamitra. Buletin kalyanamitra kali ini bernama Perempuan Bergerak.

Buletin Perempuan Bergerak merupakan sarana informasi kalyanamitra untuk menyediakan informasi kritis mengenai isu-isu perempuan. Buletin ini adalah wajah baru dengan semangat baru dan konteks yang baru. Mengapa kami mengubah namanya? Alasannya sederhana, pertama, kami ingin agar kawan-kawankalyanamitra lebih besar keterlibatannya dalam mewarnai buletin ini. Kedua, agar kawan-kawan kalyanamitra melihat jelas titik-pijak sikap politik kami dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan hak asasi manusia pada umumnya. Ketiga, bagi kami sendiri, ini tentu makin menyemangati dan menggairahkan komitmen untuk konsisten bersikap dan bertindak serta berpihak. Dengan buletin ini, kami berharap sumberdaya yang tersedia di kalyanamitra bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi gerakan dan kemajuan perempuan Indonesia.

Selain mengubah nama buletin, kami juga mengubah slogannya. Slogan buletin sebelumnya adalah “titian menuju pemberdayaan perempuan”, dan kini slogannya menjadi “bersatu, bersama, lawan tirani”. Kami menyadari bahwa proses pemberdayaan perempuan di Indonesia akan terhambat apabila kekuatan gurita kapitalisme membelit. Kami melihat bahwa di dalam sistem kapitalisme yang ada, kekuatan tirani (kekuatan yang menindas dan mengeksploitasi perempuan) kian bercokol. Tirani itu tak hanya dikerjakan oleh negara dengan segenap aparatnya, Namur juga berdimensi nilai-nilai yang patriarkhal. Dengan slogan tersebut, kami berharap semua sistem yang menindas perempuan dapat dirombak, untuk menuju tata kehidupan yang adil, setara, dan tidak seksis.

Dalam edisi Januari-April 2008, topik yang kami angkat ialah “Perempuan Potensial menuju Pemilu 2009”. Untuk mengupas hal itu, maka kami membahasnya dalam Fokus Utama, Opini, dan Warta Perempuan. Isu perempuan lainnya juga kami persembahkan guna menambah khasanah pemahaman dan pengetahuan serta penambah keterampilan berpikir kita semua. Dalam isu ini, kami bahas pula masalah perspektif, sosok, budaya Pop, dan Pustakaria.

Sebenarnya banyak keinginan dan harapan yang hendak kami utarakan melalui media komunikasi kita yang baru ini, namun semua itu berpulang kepada dukungan penuh sidang pembaca yang budiman. Mudah-mudahan kehendak dan kerja awal ini bisa kita perkuat dan teruskan, sehingga media ini bisa terbit secara teratur dan dengan kualitas isi yang terus meningkat. Perbaikan dan perubahannya akan sangat bergantung pada kesediaan sidang pembaca yang budiman untuk memberikan saran, kritik, dan masukannya yang membangun. Pada gilirannya, kawan-kawanlah yang secara tidak langsung turut aktif mengelolanya.

Semoga api perjuangan di sanubari kita terus menyala, dan tujuan kita untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terhapusnya kekerasan terhadap perempuan dapat terwujud. Itulah demokrasi dambaan kita semua. Selamat membaca!

Jakarta, 21 April 2008

Sulistiyono

Redaktur Pelaksana

SALAM PEREMPUAN hal.2

REMBUG PEREMPUAN hal.3

FOKUS UTAMA

PEREMPUAN HARUS BERPOLITIK!

Manusia adalah makhluk politik (dalam bahasa



Yunani disebut zoon politicon). Manusia bersama-sama membangun tata kehidupannya. Mereka ciptakan berbagai perangkat penata kehidupan, seperti hukum, aturan, kebijakan, dan lainnya... hal. 5

OPINI

ANGKA KERAMAT; Oleh Sisiliawati., SE

Hangatnya pertarungan pemilu 2009, mulai terasa beberapa bulan ini. Lebih hangat ketika partai-partai baru yang ingin masuk dalam arena pertarungan 2009, berbondong-bondong menyerahkan dokumen administratif ke DEPKUMHAM. Hasilnya 43 calon partai politik... hal. 8

TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM LEGISLATIF DI PEMILU 2009

Oleh Rena Herdiyani

Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28 H ayat 1, tentang perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama mencapai persamaan dan keadilan. .. hal.11

WARTA PEREMPUAN

PEREMPUAN DAN KUOTA 30 PERSEN:

JAUHNYA HARAPAN

Perempuan Indonesia kini sedikit bisa berbangga hati. Perjuangan panjang berliku dan melelahkan dalam memperjuangkan hak politiknya, sekarang membuahkan hasil meskipun belum maksimal. Undang-Undang Politik No.Tahun ... kini sudah mencantumkan kata "harus" untuk kuota 30 persen perempuan di parlemen dan di semua tingkatan partai sampai ke tingkat daerah... hal.14

SOSOK

DINA LUMBANTOBING:
PEREMPUAN GIGIH
PENGGIAT KESETARAAN
GENDER hal. 16



PERSPEKTIF

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF FEMINISME hal. 18

BUDAYA POP

BUDAYA MASSA SEBAGAI BUDAYA POPULER
Budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia mencakup pikiran; akal budi. Akal budi dan pikiran sejatinya karya atau ciptaan manusia yang bermasyarakat, sehingga terbentuk peradaban. Dengan demikian, budaya erat kaitannya dengan masyarakat dan adat istiadat hal.23

PUSTAKARIA

PEREMPUAN YANG MENEGAKKAN
SEJARAH! hal.26

CINTA SEJATI GEISHA hal. 28

PUISI PEREMPUAN

Elegi Perempuan; Oleh Kirana Kejora hal.31

Kumpulan Puisi Politik Oleh Andrinof A Chaniago
hal.31

Nirwana Cinta Selamanya Oleh Kirana Kejora
hal.31



PEREMPUAN HARUS BERPOLITIK!



Manusia adalah makhluk politik (dalam bahasa Yunani disebut *zoon politicon*). Manusia bersama-sama membangun tata kehidupannya. Mereka ciptakan berbagai perangkat penata kehidupan, seperti hukum, aturan, kebijakan, dan lainnya. Perempuan pun secara logis merupakan makhluk politik.

Lalu, apa yang membuat perempuan kemudian tertinggal jauh dari laki-laki dalam dunia politik? Tentu itu membutuhkan analisis sejarah masyarakat yang panjang dan meletakkan persoalannya secara hati-hati.

Mari kita kembali pada fakta-fakta yang ada dan berkembang kini. Keterasingan perempuan dalam politik Indonesia bisa diamati sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 2004. Rata-rata keterwakilan perempuan di dunia legislatif pusat hanya 8,8 persen, di daerah angkanya bertambah parah. Di tingkat provinsi hanya 6 persen. Bahkan, di tingkat kabupaten hanya 2,5 persen. Tahun 2004, angka keterwakilan hanya mampu diraih rata-rata 11 persen. Padahal, jumlah penduduk perempuan lebih dari jumlah penduduk laki-laki. Sementara itu, di Amerika Serikat sudah mencapai 16,5 persen, Filipina 17,6 persen, dan Vietnam 27,3 persen. Beberapa negara Eropa bahkan lebih tinggi dari itu.

Kendala Utama: Sisa-sisa Otoritarianisme Orde Baru dan Imperialisme

Sejak rejim Orde Baru berkuasa rakyat Indonesia kehilangan kemampuan, daya dan energi politiknya. Orde Baru yang otoriter dengan berbagai cara dan alat menghilangkan tradisi dan budaya politik atau berpolitik rakyat. Secara historis, kita terbiasa dan mengenal baik politik bahkan menggumulinya sebagai upaya berbangsa dan bernegara yang demokratis. Namun, Orde Baru memberangus segala kemampuan kita dalam politik dan berpolitik.

Kendala itulah yang secara sadar merasuk dalam kehidupan perpolitikan perempuan. Sangat sedikit, kalau hendak dikata jarang, perempuan memasuki dunia politik. Orde Baru berhasil menanamkan dalam kesadaran perempuan bahwa politik itu "kotor" dan sejenisnya. Belum lagi cengkraman nilai-nilai budaya patriarkhal (sisa-sisa feodalisme), makin memperburuk citra politik itu sendiri. Akibatnya,

kebanyakan perempuan menjadi "mayoritas bisu" dalam dunia politik Indonesia. Mereka ngeri dan takut dengan politik. Padahal, dalam dunia feminis kita kenal sebutan "personal is political" (hal-hal yang pribadi juga merupakan persoalan politik).

Fakta-fakta sosial lainnya bisa menguatkan betapa rejim Orde Baru berjaya menindas kehidupan politik perempuan, yakni menerapkan sistem demokrasi yang sentralistik otoriter, sehingga tidak ada ruang bagi perempuan menyatakan aspirasinya. Partai-partai politik yang ada diperkecil jumlahnya dan UU Politik mengaturnya sedemikian ketat, sehingga semuanya hanya permainan kotor Soeharto dan kroni-kroninya. Baru dalam era reformasi, pola-pola lama perpolitikan Indonesia di permukaan sedikit berubah, meski intisari kekuatan lama tetap berkuasa.

Selain menindas, rejim Orde Baru terkenal dengan karakter politik yang senantiasa memakai kekerasan dan pemaksaan kehendak. Militer sebagai lembaga mewakili karakter tersebut, kita lihat sangat dominan dalam politik Indonesia. Hampir semua posisi strategis kekuasaan dipegang kalangan militer, sehingga masyarakat sipil tersingkir ke pinggiran arena politik. Termasuk perempuan, mereka lebih dulu diseragamkan melalui lembaga-lembaga ciptaan Orde Baru, seperti Darma Pertiwi, Darma Wanita, dan sebagainya. Intinya, Orde Baru sangat berkepentingan mengatur kehidupan politik perempuan menjadi pendukung kepentingan otoriter rejim.

Orde Baru lama berkuasa karena ditopang kekuatan kapitalisme dunia. Bahkan, Orde Reformasi pun kini berkuasa karena didukung kapitalisme dunia. Jelas-jelas betapa gampang IMF, World Bank, dan MNC, mengatur keputusan politik Indonesia. Tidak ada lagi kedaulatan rakyat. Harga diri bangsa diinjak-injak. Semua sumber daya (manusia dan alam) dihisap menjadi keuntungan mereka dan kroni-kroni Orde Baru dan Orde

Reformasi. Pemerintahan yang ada seperti maling menjarah harta rakyat. 63 tahun kemerdekaan Indonesia, hasilnya hanyalah kemiskinan rakyat. Apa yang tersisa bagi perempuan Indonesia? Mereka menjadi sapi perahan pemodal dalam negeri dan asing.

Meretas Jalan Menuju Kebebasan Berpolitik

Perjuangan perempuan dalam politik Indonesia masih panjang prosesnya. Tidak hanya dalam politik formal, yakni melalui demokrasi keterwakilan, tetapi juga politik non formal, dalam kepemimpinan-kepemimpinan lokal. Kebebasan berpolitik bagi perempuan harus menjadi agenda nasional yang berkelanjutan, baik dikerjakan oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil. Kekangan sisa-sisa otoritarianisme Orde Baru, bahkan konservatisme Orde Reformasi, mesti dihapus agar perempuan bisa mengecap kemerdekaannya.

Pemerintah dan partai-partai politik saat ini harus mengubah paradigma mereka melihat keterlibatan perempuan dalam politik. Sebagai pemerintah, hak-hak perempuan hendaknya dijamin dan dipastikan dijaga dan dipenuhi negara. Jangan ada lagi diskriminasi dalam cara pandang, keputusan dan

kebijakan pemerintah terkait kepentingan perempuan. Sebagai partai-partai politik, keterlibatan perempuan di kepengurusan tingkat pusat sampai lokal akan memperkaya sumberdaya organisasi dan mendorong prakarsa partai mencapai sasaran-sasaran perjuangannya. Dengan terbukanya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan partai-partai politik, dari tingkat atas sampai bawah, dari pusat sampai daerah, maka tantangan-tantangan kedepan kehidupan bangsa dan negara dapat disikapi dan dijawab dengan tepat.

Pada saat yang sama, peningkatan partisipasi politik perempuan memainkan peran penting dalam usaha memerangi korupsi

Pemerintahan yang ada seperti maling menjarah harta rakyat. 63 tahun kemerdekaan Indonesia, hasilnya hanyalah kemiskinan rakyat. Apa yang tersisa bagi perempuan Indonesia? Mereka menjadi sapi perahan pemodal dalam negeri dan asing.

dan meningkatkan stabilitas politik di dalam masyarakat. Juga untuk meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan kehidupan partai-partai politik. Selain itu, hadirnya perempuan dalam pemerintahan dan partai-partai politik akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Korupsi akan berkurang bila jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik dan masyarakat meningkat. Semakin banyak jumlah perempuan yang terlibat dalam kehidupan politik—sebagai pemilih, pemimpin partai politik atau pejabat pemerintah—kian banyak kebijakan publik yang merefleksikan kekuatan, kepentingan, dan perspektif perempuan.

Perempuan Indonesia memiliki fondasi hukum dan sosial yang kuat untuk berpolitik. Secara hukum, ada tiga sumber hukum penting standar internasional untuk mendefinisikan persamaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan menganjurkan perlakuan yang sama dalam kehidupan politik dan publik: 1) Konvensi mengenai Penghapusan dari Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 2) Platform Aksi Beijing PBB, dan 3) Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1325. Di tingkat nasional, ada Pancasila dan UUD 1945, yang menjamin hak-hak yang sama dan kebebasan perempuan berpolitik.

Penguatan Kualitas Perempuan dalam Politik

Upaya memperkuat kualitas perempuan dalam politik mesti dikerjakan secara sinergis oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, partai politik, masyarakat sipil). Tindakan afirmatif keterwakilan politik 30 persen harus dipandang bersifat sementara. Kuota bukan tujuan akhir, hanya upaya sementara mempercepat mekanisme politik bekerja bagi kepentingan perempuan. Tidak perlu ada debat kusir soal prosentase keterwakilan, yang mendasar ialah mengubah sistem politik selama ini yang tak berpihak pada perempuan. Dengan demikian, kita mempersiapkan langkah awal yang kondusif bagi perempuan bermain di arena politik guna memperkaya khasanah demokrasi.

Dalam kaitan itu, peningkatan kapasitas politik perempuan mulai tingkat akar rumput sampai atas perlu dilakukan konsisten. Pendidikan politik yang berbasis komunitas untuk akar rumput menjadi kebutuhan mendesak. Tidak hanya pendidikan untuk pemilu, karena politik lebih luas maknanya dari sekadar itu. Selama ini yang terjadi, justru perempuan diajari cara mencoblos calon-calon dan tata cara di seputar bagaimana memilih. Ini suatu penyempitan makna demokrasi. Mereka wajib dan dipaksa memilih, namun tak punya hak untuk dipilih dan memaknai kebebasan berpolitiknya. Suatu pelanggaran demokrasi yang prinsipil.

Pendidikan politik yang dilakukan hendaknya tidak bias gender, primordialisme sempit, rasisme, diskriminatif, dan a-historis. Dengan begitu, kualitas sumber daya perempuan siap meretas hambatan-hambatan kultural dan struktural yang ada. Perempuan harus meyakinkan dan memastikan diri mereka sendiri bahwa mereka mampu melakukan dan memperjuangkannya. Saat inilah momen yang tepat bagi perempuan Indonesia untuk berpolitik; merebut dan meraihnya! Bersatulah untuk memenangkannya!

Agar perempuan dipastikan hak-hak politiknya direalisasi oleh negara dan masyarakat, beberapa rekomendasi berikut harus dilaksanakan: 1) Mencabut larangan terhadap partisipasi politik perempuan, termasuk larangan terhadap hak dipilih dan pencalonan perempuan, 2) Meningkatkan jumlah pejabat terpilih perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal, 3) Memastikan bahwa partai-partai politik merangkul perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan yang strategis dalam jumlah yang berarti, dan 4) Menggunakan teknologi, di dalam partai atau pemerintahan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan dan menginformasikan bagi mereka program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah. (HG)

ANGKA KERAMAT

Oleh Sisiliawati., SE *)

Hangatnya pertarungan pemilu 2009, mulai terasa beberapa bulan ini. Lebih hangat ketika partai-partai baru yang ingin masuk dalam arena pertarungan 2009, berbondong-bondong menyerahkan dokumen administratif ke DEPKUMHAM. Hasilnya 43 calon partai politik baru. Beberapa mulai berguguran. Baik dengan alasan tidak cukup waktu, hambatan di lapangan maupun alasan klasik, keterbatasan dana.

Apa sesungguhnya yang mendorong munculnya partai-partai baru ini? Dari profil partai-partai tersebut, dapat disimpulkan, belum maksimalnya pelaksanaan pemerintahan yang terbuka, adil dan demokratis, baik oleh partai-partai senior (tradisional) maupun partai-partai yang relatif baru/muda.

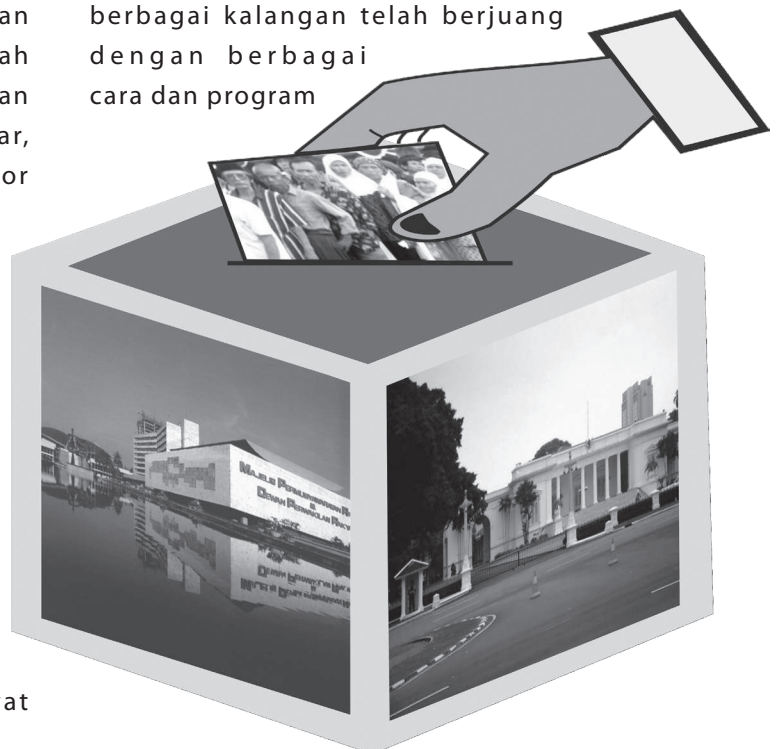
Dalam sejarah Indonesia, demikian juga sejarah dunia, agak sulit menemukan tokoh-tokoh perempuan yang muncul, maju dan berhasil mempertahankan bahkan menyebar luaskan ide-ide pembebasannya. Saat ini mungkin kita bisa berkaca atau melihat langkah perjuangan Aung San Su Kyi di Kamboja. Atau langkah perjuangan Hillary Clinton untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat. Sejarah Indonesia, baru memiliki satu orang perempuan yang berhasil memimpin sebuah partai besar, dan pernah mencicipi empuknya kursi nomor satu Indonesia.

Undang-Undang Pemilu Nomor 2 tahun 2008 pasal 2 ayat 5 menyebutkan, bahwa kelompok perempuan harus dilibatkan minimal sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh jumlah pengurus partai politik pusat, dan harus dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

Demikian juga dengan calon legislatif yang diusulkan atau di promosikan dalam proses pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, bahkan dalam tim Komisi Pemilihan Umum, angka keramat tersebut juga tidak boleh dilupakan. Pasal 6 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2007 menyebutkan komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Kelompok perempuan memiliki kartu pas, harus memasukan perempuan dalam daftar pengurus partai dan daftar pilih calon legislatif.

Isu pelibatan perempuan dalam partai politik maupun kegiatan lainnya yang berbau politik telah lama di kumandangkan. Demikian juga berbagai kalangan telah berjuang dengan berbagai cara dan program



melakukan promosi maupun pendidikan kepada masyarakat luas, terutama melalui kegiatan pendidikan kesetaraan gender yang sering terpelesep menjadi kesetaraan perempuan.

Hambatan

Sadar atau tidak sadar, ada belenggu hambatan yang begitu kuatnya melingkari pinggang setiap perempuan ketika akan terjun ke dunia politik atau organisasi.

1. Mungkin telah menjadi tradisi, ketika ada pelibatan perempuan dalam sebuah kelompok atau organisasi, jabatan bendahara sering kali jatuh ke tangan perempuan. Demikian juga dengan urusan makan-makan, perempuan pasti ditempatkan di situ.

2. Psikologis, posisinya sebagai seorang ibu rumah tangga, menjadi hambatan terbesar untuk lebih banyak perempuan terlibat dalam organisasi ataupun sebuah partai politik. Akan lebih mudah menemukan keanggotaan dan pengurusan arisan RT atau Kompleks yang dikelola kelompok perempuan dari pada anak cabang atau pengurus cabang sebuah partai politik.

3. Pandangan atau stigma yang telah mendarah daging, bahwa perempuan di rumah mengurus anak dan rumah tangga. Laki-laki untuk urusan luar rumah. Bekerja dan mungkin menjadi calon anggota legislatif misalnya.

4. Keterbatasan pengetahuan atau informasi berkaitan dengan peran politik perempuan dalam pengurusan legislatif, menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan sangat sedikit kelompok perempuan yang mencalonkan diri dan akhirnya memperoleh dukungan.

Pemilu 2009

Keterlibatan perempuan dalam pemilu 2009, semestinya dimulai sekarang. Dengan mencalonkan diri sebagai calon tim seleksi KPU, calon anggota KPU dan tentunya menjadi pengurus partai politik (tidak hanya mencalonkan diri, tetapi masuk menjadi anggota KPU dan pengurus partai politik). Bukan hanya posisi-

posisi "tak berarti" atau posisi tradisional, tetapi posisi penting, posisi yang bisa terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan partai.

Pendidikan politik bagi kelompok perempuan menjadi kebutuhan tak terhindarkan. Tidak hanya pada kelompok-kelompok perempuan di pedesaan yang jarang ataupun tidak pernah mendapat pendidikan politik, tetapi juga pada kelompok perempuan di perkotaan bahkan pada kelompok perempuan berpendidikan.

Pendidikan politik ini tidak hanya sekedar soal nyoblos calon legislatif, atau tanda partai. Tetapi soal peran politik perempuan, peluang yang ada bahkan strategis politik perempuan.

Sering kali terjadi ketika seorang perempuan mencalon diri untuk menjadi anggota legislatif, yang dilakukan tidak ada bedanya dengan calon legislatif pria yang menganggap pemilih potensialnya adalah semua orang terutama kalangan pria. Dan parahnya lagi, mereka masuk kancah perebutan kursi tanpa mengenali sasaran dan target pemilih.

Memang, ada litbang partai yang seharusnya melakukan perhitungan ataupun kalkulasi pemilih potensial, data pemilih sah tahun sebelumnya maupun data lainnya, tetapi sering kali data ini hanya menjadi arsip di dalam lemari partai dan terlupakan ketika akan melakukan kampanye.

Pendidikan politik yang diperlukan di antaranya :

1. Pendidikan pemilih. Akibat budaya paternalistik, bangsa ini lebih mengenal dan menghormati/menghargai pemimpin pria baik di dalam lingkungan eksekutif maupun legislatif. Di masa lalu, sulit sekali melihat atau menemukan calon legislatif perempuan, yang akhirnya bisa menduduki kursi legislatif. Demikian juga dengan posisi penting di legislatif. Yang paling sering atau mungkin memang sudah jatahnya, Menteri

Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Selain itu, semua kementerian dipimpin oleh kelompok pria.

2. Pendidikan untuk calon legislatif Perempuan, tidak hanya pada kelompok sasaran utama (perempuan) tetapi juga kepada kelompok agama yang sering kali juga tidak atau kurang memberikan penghargaan dan kesempatan kepada figur perempuan yang akan tampil sebagai penggiat politik di Indonesia.

3. Pengawasan legislatif perempuan. Pengawasan ini lebih ditujukan pada kinerja atau aktivitas anggota legislatif perempuan, terutama pada upaya untuk mendorong atau menginisiatif kebijakan yang lebih berpihak atau mendukung keberdayaan perempuan.

Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan ruang yang cukup besar dan luas bagi keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan di Indonesia. Demikian juga dengan fasilitas umum yang juga mengakomodir keperluan spesifik perempuan seperti tempat untuk menyusui atau cuti datang bulan.

Tetapi, peran politik yang tersedia, bila tidak ada respons atau minat dari perempuan juga (seperti calon anggota KPU, yang ternyata pendaftarannya semuanya dari pria), tentunya tidak dapat di paksakan dan akhirnya hanya kaum Adam. Lepaslah kesempatan yang datangnya hanya lima tahun sekali. Sebagai contoh, tidak ada upaya dari kelompok perempuan misalnya untuk memantau keterlibatan perempuan dalam tim seleksi calon anggota KPU periode 2008-



2013. Adakah upaya serius perempuan untuk memaksimalkan keterlibatan 30% perempuan dalam kancah politik Indonesia, atau cukup puas tertulis di Undang-Undang saja?

*)Kandidat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, seleksi tahun 2008. Aktif sebagai Pengurus Credit Union Gitaruai periode 2006-2009 dan aktivis Pemuda GPPIK Mempawah periode 1980-2000.



TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DI PEMILU 2009

Oleh Rena Herdiyani *)

Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28 H ayat 1, tentang perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama mencapai persamaan dan keadilan.

Keterlibatan perempuan dalam politik juga mendapat jaminan hukum melalui UU No. 68/Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik perempuan, UU No. 7/Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 12/Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik, UU No. 39/Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua perangkat hukum itu menjamin keterwakilan perempuan di legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Selain jaminan Konstitusional dan UU, keterlibatan perempuan dalam politik juga tertuang dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti Instruksi Presiden (Inpres) No.9/Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini mengharuskan program pembangunan nasional dirancang berperspektif gender.

Peluang partisipasi politik perempuan saat ini kian terbuka melalui UU No. 22/Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan revisi UU Partai Politik No. 2/Tahun 2008 dan UU Pemilu baru. Dalam kedua UU tersebut, terdapat kemajuan dalam aturan minimal kuota 30 persen perempuan. Hal ini terlihat dalam tabel berikut :

Pasal-pasal Penjamin Keterlibatan Perempuan dalam Politik
(UU Penyelenggara Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pemilu)

UU No. 22/tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu	UU No. 2/tahun 2008 tentang Partai Politik	UU No. 10/ tahun 2008 tentang Pemilu
Pasal 6 ayat 5: Komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal 43 ayat 3: Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal 73 ayat 8: Komposisi keanggotaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.	Pasal 2 tentang Pembentukan Partai Politik: (Ayat 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk paling sedikit oleh 50 orang WNI, berusia 21 tahun dengan akta notaris (Ayat 2) Pendirian dan pembentukan partai politik di tingkat pusat menyertakan 30% keterwakilan perempuan. (Ayat 5) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 11 tentang Tujuan dan Fungsi Partai Politik Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.	Kepengurusan partai politik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal 60: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 62 ayat 2: Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Catatan : Penyusunan daftar calon anggota legislatif harus dilakukan secara berselang-seling perempuan dan laki-laki (disebut "zipper"—seperti ritsleting yang tersusun berselang-seling), dari setiap tiga calon harus terdapat satu perempuan.

UU No. 22/tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu	UU No. 2/tahun 2008 tentang Partai Politik	UU No. 10/ tahun 2008 tentang Pemilu
	Pasal 20 tentang Kepengurusan Partai Politik: Kepengurusan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD/ART Partai Politik masing-masing. Pasal 31 tentang Pendidikan Politik Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Pasal 51 tentang Ketentuan Peralihan (Ayat 1) Partai Politik yang menurut UU No. 31/tahun 2002 tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 31/2002, tetap diakui keberadaannya. (Ayat 2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan, Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan. Catatan : UU Parpol baru ini tidak berlaku retroaktif (sebelum UU Parpol baru disahkan). UU ini hanya berlaku bagi Parpol yang baru dan bagi Parpol lama tetap diharuskan menyesuaikan dengan UU baru.	Pasal 64 ayat 2: KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota memberikan kesempatan 1 kali kepada peserta pemilu (Partai Politik) untuk memperbaiki daftar calon. Pasal 73: KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Kemajuan UU Pemilu yang baru secara umum ialah mengubah istilah yang lebih tegas tentang aturan kuota 30 persen perempuan dalam bakal calon legislatif Parpol, yakni istilah “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen” dalam pasal 65 ayat 1 UU No.12/tahun 2003, berubah menjadi “memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan”. Selain itu, hal progresif dalam UU Pemilu baru ialah adanya sanksi moral oleh KPU dan KPUD bagi parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon legislatifnya, melalui pengumuman di media massa nasional. Saat ini, UU Partai Politik baru juga lumayan tegas mengatur kuota 30 persen perempuan melalui istilah “menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam pendirian dan kepengurusan parpol”.

Dengan aturan dalam UU Parpol dan UU Pemilu baru, maka para partai politik mau tak mau merekrut perempuan sebagai calon legislatifnya dalam Pemilu

2009. Untuk mengantisipasi hal tersebut, belum lama ini Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) dan Pusat Gender & Seksualitas FISIP UI (dengan dukungan The Asia Foundation dan Kedutaan Besar Norwegia) meluncurkan database 990 perempuan yang dianggap potensial sebagai calon anggota DPR. Strategi ini dilakukan untuk meng-counter alasan banyak partai politik tentang sulitnya mencari calon-calon legislatif perempuan karena minimnya jumlah sumber daya manusia perempuan.

Rendahnya kualitas dan banyaknya perempuan yang tidak berminat pada dunia politik merupakan alasan tersendiri. Tentu saja, walaupun ada database perempuan potensial, tidak begitu saja partai politik merekrut mereka, khususnya calon-calon dari masyarakat sipil. Sebagian parpol besar, seperti Golkar mensyaratkan setidaknya calon harus menjadi pengurus parpol dan telah 6 bulan menjadi anggota partai. Mereka melakukan seleksi calon

legislatif potensial yang memiliki basis massa dan cukup dikenal dan berpengaruh di masyarakat.

Tentu, hal itu menjadi salah satu tantangan bagi perempuan dari kalangan masyarakat sipil. Oleh karena, selama ini, masyarakat sipil menganut prinsip non partisan (tidak terlibat politik) dan sikap apatisme terhadap parpol, membuat mereka enggan membangun komunikasi politik dengan parpol. Sikap apatisme demikian muncul lebih karena masih kuatnya paradigma oligarkhi di tubuh parpol yang mengabdikan pada kepentingan segelintir orang (kelompok) dan nyaris melupakan kepentingan rakyat (konstituen) yang diwakilinya.

Secara normatif, banyak aturan hukum dan kebijakan yang menjamin partisipasi perempuan dalam politik. Namun sayang, pelaksanaannya belum maksimal. Itu bisa dilihat dari minimnya jumlah perempuan yang duduk dalam jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga publik lainnya. Saat ini, jumlah anggota DPR yang perempuan baru berjumlah 63 orang dari 550 anggota DPR RI (sekitar 11,27%), DPRD Provinsi 9%, dan di DPRD Kabupaten/ Kota rata-rata 5%, bahkan banyak DPRD Kabupaten/Kota yang semua anggotanya laki-laki.

Hambatan terbesar yang dihadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik formal yakni masih kuatnya budaya patriarkhal. Nilai-nilai ini dibangun secara sistematis melalui tradisi dan pandangan masyarakat, penafsiran nilai-nilai agama maupun kebijakan-kebijakan publik lokal yang memandang perempuan tidak setara. Situasi demikian mengakibatkan perempuan tidak percaya diri atas potensinya. Selama ini, politik identik dengan permainan kotor demi kekuasaan (money politic) dan saling jegal. Dunia politik identik dengan dunia laki-laki, dan tak cocok untuk perempuan. Banyak parpol belum mendukung sepenuhnya perwujudan kesetaraan gender. Perempuan dalam parpol ditempatkan pada posisi yang tidak strategis. Pendidikan politik tidak dilakukan secara intensif bagi kader-kader perempuan. Dan, parpol tidak

memberikan peluang kepada mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses keputusan-keputusan politik internal dan eksternal.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif di Pemilu 2009, tentu dituntut komitmen parpol yang konsisten agar kuota 30 persen keterlibatan perempuan dalam politik nyata. Pengalaman pemilu 2004 menegaskan, banyak caleg perempuan gagal akibat ditaruh di urutan nomor bawah dan diwakilkan dari daerah pemilihan di mana mereka tidak memiliki basis. Caleg perempuan hanya dijadikan komoditas parpol untuk meraih simpati dan suara pemilih perempuan. Sudah waktunya budaya parpol diubah agar lebih mendorong kemajuan perempuan dan akomodatif terhadap kepentingan perempuan. Sanksi moral bagi parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg, harus benar-benar diterapkan.

Hambatan terbesar yang dihadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik formal yakni masih kuatnya budaya patriarkhal.

Sisi lain, kelompok-kelompok perempuan mesti kerja keras melakukan pendidikan politik terus-menerus. Juga mempersiapkan dan mendorong perempuan-perempuan potensial agar terjun dalam politik formal untuk menguji kualitas caleg perempuan. Pendidikan kritis sangat penting dikerjakan di masyarakat pemilih tentang pentingnya keterwakilan perempuan, di samping memilih caleg-caleg potensial yang memiliki hati nurani untuk memperjuangkan kemajuan hidup rakyat, khususnya kualitas hidup perempuan.

Apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan keterwakilan perempuan dalam politik dibandingkan negara-negara Scandinavia yang rata-rata mencapai kuota perempuan 40 persen dalam legislatifnya? Lihat saja di Pemilu 2009! Harus dibuktikan bahwa Indonesia mampu mewujudkannya minimal kuota 30 persen perempuan di legislatif. Jelas perlu kerjasama berbagai pihak untuk mendukung caleg-caleg perempuan guna mewujudkan persamaan perempuan dalam politik secara de facto.

*) Direktur Eksekutif Kalyanamitra

PEREMPUAN DAN KUOTA 30 PERSEN: JAUHNYA HARAPAN

Perempuan Indonesia kini sedikit bisa berbangga hati. Perjuangan panjang berliku dan melelahkan dalam memperjuangkan hak politiknya, sekarang membuahkan hasil meskipun belum maksimal. Undang-Undang Politik No.Tahun ... kini sudah mencantumkan kata "harus" untuk kuota 30 persen perempuan di parlemen dan di semua tingkatan partai sampai ke tingkat daerah. Sebelumnya, UU tersebut hanya mencantumkan kata "dapat" untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Kerberhasilan ini tidak lepas dari perjuangan perempuan-perempuan yang selama ini gigih menuntut persamaan hak politiknya dengan kaum laki-laki. Setelah keberhasilan tersebut, apakah masalahnya berhenti sampai di situ?

Ternyata, banyak persoalan kini menghadang langkah politik perempuan untuk duduk di parlemen. Persoalan tidak hanya datang dari eksternal perempuan, namun internal juga. Menurut Nursanita, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menuturkan, bahwa walaupun perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, namun sangat disayangkan masih banyak perempuan Indonesia yang menganggap dunia politik itu dunia laki-laki. Oleh karena itu, menurutnya, harus ada kesadaran hak politik kepada perempuan, misalnya oleh gerakan perempuan atau para aktivis lainnya untuk mendorong partisipasi perempuan di dunia politik. Dengan tercapainya kuota 30 persen, maka diharapkan itu akan lebih membuat bangga dan memacu semangat para perempuan sendiri untuk berpolitik.

Masih kuatnya pengaruh budaya patriarkhi juga menjadi soal tersendiri yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. "Laki-laki belum secara legowo dapat menerima perempuan di dunia politik", ujar Nurul Arifin, aktivis Partai Golkar yang juga seorang artis ini. Tidak dapat dipungkiri, eksistensi perempuan di dunia politik memang masih kurang. Budaya kita masih menganggap perempuan tidak layak bermain di ranah politik. Tafsir agama yang keliru masih menjadi pagar kokoh yang membatasi ruang gerak perempuan maju di dunia politik (notabene didominasi kekuatan laki-laki).



"Adanya dalil yang menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan seringkali menjadi dalil yang banyak disalah tafsirkan laki-laki sehingga perlu direinterpretasikan kembali agar tidak terjadi bias gender", demikian pendapat seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.

Persoalan budaya dan agama boleh menjadi penghambat, namun kini tugas berat kaum perempuan dalam mengisi ruang keterwakilannya di parlemen, di partai politik, ormas. Bagaimanapun kaum perempuan yang duduk di sana diharapkan mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Kuota 30 persen harus dimaknai tidak hanya dalam segi kuantitas, namun kualitas juga, sehingga perempuan bisa sejajar. Yang terpenting, dengan kuota tersebut, perempuan harus mampu mengisinya dengan kandidat-kandidat yang berkualitas yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat umumnya, kalangan perempuan khususnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan-perempuan yang duduk di parlemen sekarang belum sepenuhnya mampu menyuarakan aspirasi kaumnya sendiri, apalagi rakyat banyak. Menanggapi kondisi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari

fraksi Demokrat, Beni K. Harman, menilai bahwa perempuan yang duduk di parlemen saat ini masih kurang gaungnya. "Maka dengan adanya kuota 30 persen yang diberikan untuk perempuan, hendaknya masing-masing partai mengirimkan wakil-wakil perempuannya yang berkualitas." Jelasnya.

Berbeda dengan pendapatnya Beni K. Harman, Masruchah, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, menilai perempuan-perempuan yang saat ini duduk di parlemen secara kualitas sudah membaik. Namun, menurutnya, akan lebih baik lagi apabila masing-masing partai lebih peduli dan memberikan ruang yang cukup luas untuk perempuan di parlemen karena perempuan mempunyai kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya dalam persoalan sosial, budaya, masalah-masalah perempuan dan anak serta persoalan hak asasi manusia. Menurut perempuan lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, keterwakilan perempuan di parlemen hendaknya didukung oleh kaum feminis dan perempuan yang berada di luar parlemen. Kekuatan perempuan di parlemen, sangatlah multidimensi, di samping harus memperjuangkan perempuan, sosial dan budaya, maka perempuan juga harus tetap berhasil di kehidupan rumah tangganya. Perempuan yang di dalam dan di luar hendaknya saling menguatkan, dan satu kata meneriakan arti perjuangan, tegasnya.

Walaupun belum ada kriteria baku dalam setiap partai untuk calon perempuan potensial yang layak duduk di parlemen, namun beberapa kalangan sudah mempunyai kriteria tersendiri, seperti pendapat Maria Ulfah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Kebangkitan Bangsa. "Pemahaman tentang Gender hendaknya harus menjadi bekal yang kuat untuk setiap perempuan yang duduk di parlemen. Hendaknya setiap partai yang ada sekarang ini, mendukung dan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada perempuan-perempuan potensial di dalam partainya untuk duduk di kursi parlemen. Untuk partai sendiri hendaknya mempersiapkan perempuan-perempuan yang memiliki perspektif yang jelas tangguh, cerdas dan sadar gender. Ini adalah idealnya seorang perempuan yang duduk di kursi parlemen", jelasnya.

Sementara itu, menurut Nursanita, "perempuan

potensial harus memiliki kematangan dari sisi emosional dan moral yang bisa memahami hak sendiri dan hak orang lain, jadi saling menghargai. Maka dari itu, perempuan yang berkualitas dibutuhkan kriteria yang baik dalam soal pendidikan formal, memiliki kepekaan sosial bukan hanya pendidikan yang bagus, tapi juga harus mempunyai sensitivitas sosial yang tinggi, dengan kepekaan sosial bisa mengontrol dirinya".

Menurut Nuraini, aktivis dari Srikandi Demokrasi Indonesia, perempuan yang duduk di parlemen haruslah mereka yang di percaya oleh rakyat, jujur dan berani. "Makanya Perempuan yang di pilih di parlemen paling tidak punya kualitas lebih dalam hal wawasan, gagasan dan berani memperjuangkan hak-hak perempuan", terangnya.

Walaupun kini sejarah sudah ditorehkan, perjuangan kaum perempuan masih sangatlah panjang. Dipenuhinya kuota perempuan untuk menduduki kursi parlemen bukanlah puncak dari perjuangan tersebut. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mempersiapkan kader-kader perempuan yang memiliki kemampuan untuk bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama aspirasinya kaum perempuan.

Di sisi lain, ketika politisi bersiap-siap untuk berebut kursi di parlemen, yang masih menjadi persoalan ialah banyak rakyat tidak mengetahui apa itu politik. Seorang ibu rumah tangga di Bilangan Pancoran Jakarta Selatan, memberikan tanggapannya mengenai kuota 30 persen perempuan di parlemen: "Repot amat mikirin parlemen, yang penting sembako gak naik terus..."

Ungkapan senada dilontarkan ibu Lis: "Susah ah mikirin yang berat-berat...mikirin anak saya aja bisa makan dan sekolah sampai selesai, suami gak selingkuh", ucapnya, menutup perbincangan. Inilah cerminan ketidaktahuan masyarakat kita tentang arti pentingnya berpolitik. Lalu, tanggungjawab siapa yang harus memberikan pengetahuan ini kepada mereka? (LS,NN)

DINA LUMBANTOBING: PEREMPUAN GIGIH PENGGIAT KESETARAAN GENDER

Dari namanya, pasti orang bisa menebak asalnya. Terlahir dengan nama lengkap Dina Lumbantobing. Sosok perempuan enerjik ini memang berasal dari Sumatera Utara. Dina, biasanya orang menyapanya. Ia aktivis perempuan yang gigih memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di Sumatera Utara.

Sebagai perempuan Batak, Dina memiliki karakter yang tegas. Berlatar belakang pendidikan pasca sarjana (S2) bidang Gender dan Pembangunan Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex, Brighton, United Kingdom. Dina sangat koncern menggeluti masalah-masalah kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan.

Ketertarikannya di dunia LSM berawal setelah ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Merasa tak cocok bekerja sebagai PNS, Dina memutuskan untuk terjun ke dunia tersebut. Langkah pertama bermula sebagai staff anggota pengembangan masyarakat di Bina Swadaya pada tahun 1982. Keprihatinannya terhadap kondisi perempuan yang selalu menjadi warga kelas dua, mendorong kepeduliannya untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender semakin kuat.

Tahun 1990, bersama kawannya, Dina mendirikan Yayasan Sada Ahmo (YSA). Awalnya LSM ini untuk masyarakat Pakpak dan anak-anak. Setelah melihat banyak perempuan punya beban kerja berlebihan, baik sebagai perempuan maupun isteri, ditambah persoalan-persoalan lain yang meminggirkan mereka, YSA akhirnya membuat kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penguatan perempuan. YSA kemudian dikenal sebagai LSM perempuan yang bergerak dalam pengembangan perempuan melalui pengorganisasian credit union (CU) dan pendidikan kritis.



Kiprahnya sebagai aktivis perempuan, yang mengidolakan sosok Aung San Suky ini, kian bertambah. Selain aktif di PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo) Dina pun kerap diundang sebagai pembicara dan fasilitator di berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Perhatiannya terhadap dunia perempuan, menyemangatnya untuk terus berjuang demi perempuan.

Bagaimana Soal 30 persen Kuota Perempuan?

"Menjadi seorang perempuan adalah juga sebuah perjuangan", ucap Dina tegas. "Emansipasi yang sekarang dirasakan kaum perempuan adalah buah perjuangan para pejuang perempuan dan bukan hanya hasil perjuangan Kartini saja. Perjuangan yang dilakukan beribu-ribu tahun kadangkala tidak akan bisa dinikmati oleh pejuangnya sendiri."

Pendapatnya, perempuan sekarang bisa mencatat sejarahnya tersendiri, ketika gerakannya memperjuangkan kuota di parlemen menjadi nyata dalam UU Pemilu. Meskipun

kuota diberlakukan, beberapa tantangan dihadapi perempuan misalnya, pertama, walaupun ada jaminan kuota 30 persen, namun bukan berarti mudah bagi perempuan masuk menjadi calon legislatif. Banyak hambatan menghadang, seperti penetapan urutan caleg di PARPOL.

Bila jumlah kursi yang ditetapkan di suatu Daerah Pemilihan adalah 20, dan PARPOL tertentu memperkirakan merebut enam kursi, maka secara sederhana dua kursi calon harus untuk perempuan. Pertanyaannya adalah, DI URUTAN MANA PEREMPUAN? Kalau perempuan terkait pengurus inti, mungkin akan memperoleh posisi di tiga besar. Tapi masalahnya, BERAPA PEREMPUAN YANG DUDUK DI KEPENGURUSAN INTI PARPOL (ketua, sekretaris, dsb.)? Sangat sedikit! Kesempatan mereka duduk di tiga besar juga mungkin dipersoalkan. Apabila tidak ada pengurus perempuan, siapa biasanya yang dipilih masuk ke urutan CALEG? Kemungkinan besar mereka yang memiliki massa atau yang mampu membangun ranting.

Kedua, perempuan dianggap tidak "pantas" dan "tidak mampu" masuk ke arena 'politik'. Pandangan ini cukup merasuk di pikiran dan cara berpikir orang-orang, bahkan di kalangan perempuan sendiri. Akibatnya fatal, perempuan yang ingin menjadi CALEG menjadi ragu-ragu, sebelum ada hambatan dari luar. Demikian pula dengan perempuan yang nanti menjadi pemilih. Mereka juga ragu memilih perempuan, apalagi laki-laki. Kalau pelaku sendiri ragu, maka perempuan juga ragu-ragu. Dengan demikian, siapa yang akan memilih perempuan?

Ketiga, pikiran yang memadam laki-laki lebih penting, mampu dan semua yang melihat posisi perempuan selalu dalam kaitan dengan laki-laki. Keempat, ketika KTP menjadi satu alat ukur hitungan pendukung CALEG dari DPD, maka DPD perempuan apalagi yang didukung perempuan di akar rumput, akan melihat hambatan di hadapannya. Dan kelima, banyak perempuan yang mengalami masalah kepercayaan diri. Bisa percaya diri mengenai kemampuan berpikir, dukungan, dan kemampuan keuangan.

Ditanya mengenai kriteria perempuan potensial yang layak duduk di parlemen, aktivis kelahiran tahun 1957 ini menjawab: "Bahwa secara pribadi, perempuan harus siap dan dukungan keluarga juga. Jaringannya harus luas dan mengakar dan semua perempuan punya potensi". "Untuk itu, perempuan harus punya strategi dalam memasuki arena politik, yakni membutuhkan dukungan dari perempuan sendiri, baru memperoleh lebih banyak dukungan dari laki-laki. Untuk itu, seyogyanya PEREMPUAN BERSATU UNTUK MENDUKUNG DAN MEMILIH PEREMPUAN. Kita semua adalah pelaku sejarah, jangan sampai kita menangisi sejarah yang kita tulis sendiri ", jelasnya. (NN)

Sumber informasi:

1. Wawancara dengan nara sumber
2. Tulisan nara sumber berjudul "Tantangan Perempuan SUMUT di Arena Politik 2003 (sebuah catatan di awal era kuota perempuan)"
3. Tulisan nara sumber berjudul "Gerakan Perempuan di Sumatera Utara, cuplikan sejarah perjalanan feminis, aktivis dan LSM Perempuan"

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME

Kekerasan terhadap perempuan sebagai isu sentral dalam gerakan perempuan terus mengalami perkembangan perspektif dan diskusi-diskusi yang alot di kalangan femini itu sendiri maupun aktivis perempuan. Diskusi-diskusi itu bisa mengerucut pada pandangan yang pro dan kontra. Namun demikian, mari kita lihat secara umum perkembangan perspektif yang ada menjadi tiga bagian besar kubu untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Pengantar Masalah

Kekerasan merupakan gejala sosial yang tua usianya, setua keberadaan manusia di muka bumi ini. Begitu pula kekerasan terhadap perempuan. Sejak manusia memberlakukan perempuan sebagai hak milik atau budak yang bisa diperjual-belikan, maka fenomena sosial kekerasan terhadap perempuan mulai menyebar. Menurut Engels, tahap tersebut dimulai pada periode Peradaban (di mana pengetahuan yang lebih jauh tentang pengolahan produk alam, melalui industri yang sesuai dan kesenian, didapatkan). Engels, mengutip Bachofen, menjelaskan bahwa transisi dari apa yang disebut "hetaerisme" (hak pada malam pertama) menuju monogami dilakukan secara mendasar oleh perempuan. Ketika hubungan seksual tradisional makin kehilangan karakter naifnya, yaitu kehidupan hutan primitif, maka posisi perempuan akan makin turun dan tertindas. Hilangnya karakter naif ini adalah akibat dari perkembangan kondisi ekonomi,



yang membawa konsekuensi runtuhnya komunisme lama dan tumbuhnya kepadatan penduduk.

Kekerasan terhadap perempuan pada zaman modern di berbagai tempat di seluruh dunia tentu melekat dengan sistem tradisi, budaya, pengetahuan, religi dan kesenian yang ada. Dan fenomena itu makin kompleks, ketika sistem kapitalisme dunia ternyata menguatkannya. Beberapa feminis mensinyalir bahwa kapitalisme dan sistem patriarkhal bagai dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling membutuhkan.

Aneka Perspektif Feminisme

Sebagian besar feminis sepakat bahwa perempuan saat ini memiliki status lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan juga didiskriminasi secara sosial budaya, ekonomi, dan politik. Hubungan tersebut memang tidak-adil dan harus diubah.



Kekerasan terhadap perempuan sebagai isu sentral dalam gerakan perempuan terus mengalami perkembangan perspektif dan diskusi-diskusi yang alot di kalangan femini itu sendiri maupun aktivis perempuan. Diskusi-diskusi itu bisa mengerucut pada pandangan yang pro dan kontra. Namun demikian, mari kita lihat secara umum perkembangan perspektif yang ada menjadi tiga bagian besar kubu untuk menjelaskan fenomena tersebut.

A. Feminisme sosialis

Feminisme sosialis dalam perjalanan sejarahnya diperkaya oleh tradisi sosialisme Barat yang berkembang. Mengikuti Engels, feminisme sosialis memandang penindasan terhadap perempuan (kekerasan) berpangkal pada sistem klas sosial. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, perempuan tidak selalu berada di bawah laki-laki. Dalam masyarakat primitif atau dikenal dengan sebutan kolektivisme tribal, perempuan setara dengan dan diakui oleh laki-laki. Perempuan kenyataannya menjadi pemimpin sosial dan budaya di dalam masyarakat egaliter, karena pada tahap mengumpulkan makanan dan berburu, tenaga mereka menjadi sangat penting. Berburu, yang dikerjakan laki-laki, tidak bisa diandalkan sebagai sumber pangan. Justru panganan sayur yang ditemukan perempuan menjadi tumpuan penting makanan bagi masyarakat primitif. Perempuan menemukan sistem pertanian, beternak hewan-hewan tertentu, mengembangkan seni tembikar dan pemintalan.

Kejatuhan perempuan dari posisi setara tersebut berkait dengan hancurnya komune klan matriarkhal dan digantikan dengan pembagian sistem klas masyarakat melalui institusi keluarga yang patriarkhal, kepemilikan pribadi dan penguasaan negara.

Dalam pandangan sosialis, pengrendahan status perempuan berhubungan dengan institusi kepemilikan pribadi dan pembagian klas masyarakat serta keluarga. Keluarga menjadi tempat pewarisan kemakmuran menurut garis kebapakan. Fungsi perempuan menjadi peranak mengakibatkan ia dimiliki suaminya. Masyarakat yang semula homogen kemudian berkembang menjadi heterogen. Pada akhirnya pembagian masyarakat itu menciptakan

kelompok yang memproduksi dan kelompok yang menikmati hasil produksi.

Perempuan mengalami penindasan seksual di dalam semua klas masyarakat. Dalam masyarakat kapitalisme modern, perempuan ditindas melalui peran subordinatnya di keluarga dan sebagai tenaga kerja. Perempuan senantiasa dirumuskan dalam pengertian peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, yang statusnya kecil. Dalam masyarakat di mana uang sangat menentukan sistem nilai, perempuan merupakan kelompok pekerja yang berada di luar ekonomi uang. Kerja mereka tidak bermakna ekonomis (uang), sehingga tidak berharga, dan akibatnya kerja mereka tidak bermakna. Bahkan, sekalipun perempuan bekerja sebagai buruh upahan, namun posisi mereka tidak begitu penting. Karena itu, perempuan menjadi "cadangan pasukan" tenaga kerja—dipekerjakan dan dipecat jika diperlukan tanpa kekuatan politis apapun.

Keluarga batih, di mana suami menjadi penafkah, menjadi fungsi penting dalam masyarakat kapitalis. Keluarga sebagai unit ekonomi, keluarga batih penting memantapkan keseimbangan kekuatan. Oleh karena laki-laki bertanggung jawab mendukung isteri dan anak-anaknya, kemampuannya mengubah pekerjaan juga terbatas. Karena isteri bergantung secara ekonomi, maka mereka secara emosi tergantung dan pasif. Perempuan akan mengalami pengaruh konservatis suami dan anak-anak mereka.

Ringkasnya, feminisme sosialis memandang bahwa penindasan terhadap perempuan (kekerasan) berakar pada faktor ekonomis. Penindasan itu bisa dijejak melalui pelembagaan kepemilikan pribadi dan pembagian masyarakat menjadi klas-klas. Ideologi seksis dan struktur keluarga mempertahankan status rendah perempuan, karena itu merupakan bagian padu dan fungsi penting bagi sistem kapitalis. Dengan demikian, diperlukan revolusi sosialis untuk memerdekakan perempuan. Dan feminisme sosialis tidak percaya, bahwa sosialisme serta merta membebaskan perempuan dari penindasan.

B. Feminisme radikal

Feminisme radikal, sebagai ideologi, ia baru berkembang dibandingkan feminisme sosialis. Feminisme radikal sepakat bahwa penindasan terhadap perempuan pertama-tama dan secara mendasar dilakukan oleh satu kelompok atas kelompok lainnya. Supremasi laki-laki adalah bentuk awal dan mendasar suatu dominasi. Segala bentuk eksploitasi dan penindasan (rasisme, kapitalisme, imperialis, dan lainnya) merupakan perluasan supremasi laki-laki (laki-laki mendominasi perempuan).

Akar masalahnya ialah sistem klas seks yang membuat perempuan jadi peranak dan disingkirkan dari kreasi dan partisipasi nyata dalam budaya. Seksisme pertama-tama berfungsi psikologis, bukan ekonomis. Chauvinisme laki-laki berkait dengan kekuasaan psikologis.

Menurut Shulamit Firestone, akar penindasan terhadap perempuan terletak di dalam pembatasan peran reproduktif biologis (melahirkan dan merawat anak-anak). Biologis membuat perempuan tergantung pada laki-laki untuk kekuatan fisik mereka. Eksploitasi perempuan oleh laki-laki (juga laki-laki oleh laki-laki) berakar pada aspek biologis, bukan ekonomis. Ketergantungan perempuan atas laki-laki merupakan prototipe segala relasi kekuasaan dan muasal kuasa psikologis untuk mendominasi yang lain. Meskipun biologis merupakan akar penindasan terhadap perempuan, namun itu masih bisa berubah.

Perkembangan teknologis memiliki potensi pembebasan atas perempuan (rahim buatan, dsb.) Penindasan itu tidak akan lenyap begitu saja sekalipun aspek biologis ditangani. Oleh karena, struktur pendukung yang mempertahankan hal itu terus bekerja. Struktur tersebut ialah keluarga dan religi.

Penindasan terhadap perempuan terwujud dalam beragam institusi yang membelenggu dan mengelola perempuan agar senantiasa terpenjara. Salah satunya, institusi perkawinan, keibuan, cinta, dan hubungan seksual (unit keluarga terbentuk oleh hal ini). Untuk membebaskan perempuan, maka segala institusi dan ideologi seksis yang membentuknya

mesti dihancurkan. Revolusi yang dibutuhkan, bukan reformasi. Feminis radikal memahami revolusi ini sebagai strukturisasi menyeluruh masyarakat yang didominasi laki-laki. Jadi, tidak hanya penghapusan privilese laki-laki tetapi juga distingsi seks (perbedaan genital manusia bukan lagi masalah budaya). Segala bentuk penentuan peran seks mestilah dihapuskan. Integrasi perempuan kedalam dunia laki-laki bukanlah jawaban.

Kalangan feminis radikal yakin bahwa penghancuran sistem klas seks akan memberikan manfaat besar bagi laki-laki karena membebaskan mereka dari peran maskulin, yang juga menindas dirinya, sehingga membuat relasinya menjadi manusiawi. Laki-laki tidak dapat diharapkan menyadari hal itu. Mereka dibungkus oleh kekuasaan psikologis dan diuntungkan oleh sistem yang ada saat ini. Semua laki-laki memperoleh manfaat ekonomis, seksual, dan psikologis oleh supremasi mereka.

Kalau demikian, seperti apa wajah masyarakat baru yang diimpikan kalangan feminis radikal? Menurut Shulamit Firestone, ada empat kondisi yang mesti dipenuhi, yakni:

1. Perempuan harus dimerdekakan dari "tirani reproduktif biologis" mereka. Kelahiran dan perawatan anak-anak harus menjadi tanggung jawab masyarakat seluruhnya. Laki-laki dan perempuan terlibat di dalamnya. Kemajuan teknologis dapat menciptakan reproduksi buatan bagi yang ingin mempergunakannya. Perubahan dalam pengelolaan anak-anak menuntut perubahan radikal reorganisasi masyarakat.
2. Penentuan penuh kemerdekaan diri laki-laki dan perempuan, termasuk secara ekonomis.
3. Integrasi total perempuan dan anak-anak kedalam segala aspek masyarakat secara luas dibutuhkan.
4. Kemerdekaan seksual mesti dijamin baik untuk perempuan maupun anak-anak.

Kalangan feminis sosialis dan radikal percaya androgini merupakan karakteristik umum suatu masyarakat yang baik. Dengan penghancuran

peran seksual, baik perempuan maupun laki-laki akan bebas mengembangkan dan mengekspresikan secara luas nilai-nilai kemanusiaan yang dihasilkan. Kreativitas, independensi, kealamiahannya, dan kepekaan menjadi karakter yang diperlukan dalam seluruh kehidupan manusia. Pembebasan tidak berarti perempuan "menjadi" laki-laki, tetapi baik laki-laki maupun perempuan dimerdekakan menjadi sungguh-sungguh manusiawi. Dalam suatu masyarakat yang baik, baik laki-laki maupun perempuan akan berbeda dari yang selama ini ada. Kepribadian tiap orang pastilah berbeda-beda, namun itu tidak berkaitan dengan masalah seks. Lebih jauh, masyarakat ditata untuk menjamin perkembangan kemajuan, seperti kerjasama dan kepekaan terhadap yang lain.

C. Feminisme moderat

Feminisme moderat memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan 2 perspektif sebelumnya. Hanya saja, titik tolak mereka adalah "prinsip liberal"—semua orang diciptakan setara dan memiliki hak yang sama. Namun mereka melihat, bahwa prinsip itu belum diterapkan sepenuhnya kepada perempuan. Kalangan moderat menyadari bahwa status kedua perempuan itu dilembagakan dan karenanya, mereka tidak bisa membebaskan dirinya sendiri hanya melalui perubahan kesadaran. Suatu gerakan massa perempuan sangat dibutuhkan. Kalangan moderat juga sepakat bahwa institusi keluarga menindas perempuan. Kala perempuan sungguh-sungguh merdeka, makhluk hidup yang setara, keluarga tidak akan menindas.

Kalangan moderat agak optimis mengenai kerjasama perempuan dengan laki-laki. Bagi mereka, tidak sepenuhnya laki-laki adalah musuh bersama perempuan, karena seksisme tidak sepenuhnya dinikmati laki-laki. Meskipun demikian, pembebasan perempuan utamanya mesti dikerjakan kalangan perempuan sendiri. Di samping itu, transformasi masyarakat dapat dilakukan melalui sistem legal (di dalam sistem). Masalah kemiskinan perempuan atau kemakmuran ibu menjadi kepedulian mereka. Feminis moderat tidak memberikan sketsa yang jelas mengenai masyarakat yang ideal.

D. Titik-Balik Pemahaman

Dari ketiga perspektif maupun gerakan tersebut, jelas terdapat perbedaan garis ideologis, strategi dan taktik. Namun begitu, terjadi penyilangan di antara ketiganya. Bentuk aksi pada salah satu gerakan juga akan mempengaruhi gerakan lainnya, dalam rangka penghapusan penindasan terhadap perempuan, yakni:

Pengembangan kesadaran

Pengembangan kesadaran sejak lama dipergunakan sebagai teknik feminis dasar oleh feminis radikal. Menolak teori abstrak kalangan "New Left" justru kalangan feminis radikal menyadari pentingnya teori berdasarkan pada pengalaman dan perasaan yang berkembang (juga mengembangkan pengalaman dan perasaan). Mereka memahami bahwa perempuan menyadari statusnya yang rendah barulah langkah awal. Melalui proses sosialisasi, perempuan menginternalisasi berbagai asumsi masyarakat yang patriarkhal. Memahami bahwa konsep maskulinitas dan femininitas masyarakat hanya asumsi belaka, bukan fakta, menjejaki akar-akarnya, dan membebaskan diri darinya, merupakan proses yang sulit. Menjadi feminis membutuhkan pemahaman intelektual dan emosional hakikat masyarakat yang patriarkhal.

Persoalan struktur

Feminis radikal melakukan kritik atas struktur tradisional organisasi yang ada. Menurut mereka, semua hirarkhi dan kepemimpinan bersifat menindas. Sebagian mereka menarik kesimpulan, bahwa struktur yang bagus ialah tanpa struktur sama sekali. Semua tugas dibagi setara. Keputusan dilakukan secara konsensus. Namun dari praktik yang ada, amatlah susah semua itu dilaksanakan. Yang penting bagaimana membangun organisasi yang tidak menindas. Namun demikian, mengembangkan organisasi yang efektif tanpa terjebak dalam hirarkhi dan tekanan, jelas tidak sederhana.

Perubahan melalui politik

Berbagai gerakan feminis yang ada telah terlibat dalam bentuk aksi-aksi politik yang tradisional dalam tujuan mengubah kebijakan pemerintah. Kalangan moderat menekankan pentingnya perubahan dengan terlibat dalam sistem. Mereka memakai berbagai taktik politik, seperti lobi, kesaksian, dan lainnya. Kalangan radikal dan sosialis, dengan keterbatasan sumberdaya, menggunakan aksi demonstrasi dan tekanan politik lainnya. Namun mereka setuju, bahwa "reformasi" tidaklah cukup. Keberagaman pandangan dan organisasi yang terlibat dalam gerakan perempuan secara independen adalah kekuatan. Selain itu, membangun gerakan yang menjawab kebutuhan zaman adalah menentukan. Ketakutan masa lalu, prasangka, dan kepicikan tidak mudah dilampaui. Oleh karena, kita memiliki kebutuhan dasar bersama, yakni masyarakat yang non seksis dan manusiawi.

"Women Question" di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, menurut Cedaw, beberapa tema besar persoalan perempuan dapat kita inventarisasi:

- Perdagangan orang dan eksploitasi prostitusi
- Kehidupan politik dan publik
- Partisipasi di tingkat internasional
- Kewarganegaraan
- Pendidikan
- Ketenagakerjaan
- Kesehatan dan keluarga berencana
- Manfaat ekonomi dan sosial
- Perempuan pedesaan
- Persamaan kedudukan di depan hukum
- Perkawinan dan kehidupan keluarga

Menurut Susan Blackburn, tema besar persoalan perempuan Indonesia yakni:

- Ideologi gender negara dan gerakan perempuan
 - Pendidikan
 - Perkawinan usia dini
 - Kewarganegaraan
 - Poligami
 - Keibuan
 - Eksploitasi ekonomi
 - Kekerasan
- (HG)

Bahan Bacaan:

1. Blackburn, Susan., (2004), *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge University Press, United Kingdom.
2. Engels, Frederick., (1884), *Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*, (edisi Indonesia), Kalyanamitra, Jakarta, April 2004.
3. Mies, Maria., (1986), *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*, Zed Books Ltd., London.
4. Sinclair Deckard, Barbara., (1983), *The Women's Movement: Political, Socioeconomic, and Psychological Issues*, (3rd ed.), Harper and Row Publisher, USA.
5. UNIFEM., (tt.), *Cedaw, untuk Kesetaraan Perempuan* (edisi Indonesia).

BUDAYA MASSA SEBAGAI BUDAYA POPULER

Budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia mencakup pikiran; akal budi. Akal budi dan pikiran sejatinya karya atau ciptaan manusia yang bermasyarakat, sehingga terbentuk peradaban. Dengan demikian, budaya erat kaitannya dengan masyarakat dan adat istiadat dari generasi ke generasi. Budaya tidak hanya kesenian atau hal-hal yang berkaitan dengan intelektual, namun mencakup seluruh pola kehidupan tatanan masyarakat.

Kilas Balik

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki kebudayaan yang beraneka ragam (multikultural). Tentu ini sudah kita ketahui sejak kita di sekolah dasar. Kebudayaan Indonesia, sebut saja budaya lokal yang beragam, membuktikan bahwa masyarakat kita memiliki kualitas produksi budaya yang luar biasa. Kekayaan budaya lokal kita banyak dikagumi negara-negara lain. Jangan heran bila banyak warga negara lain antusias mempelajari budaya kita.

Budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia mencakup pikiran; akal budi. Akal budi dan pikiran sejatinya karya atau ciptaan manusia yang bermasyarakat, sehingga terbentuk peradaban. Dengan demikian, budaya erat kaitannya dengan masyarakat dan adat istiadat dari generasi ke generasi. Budaya tidak hanya kesenian atau hal-hal yang berkaitan dengan intelektual, namun mencakup seluruh pola kehidupan tatanan masyarakat. Contohnya, cara berbicara, cara makan, atau kebiasaan berpikir dan lainnya.

Di Indonesia sendiri, budaya yang terbentuk akhirnya menjadi ciri budaya nasional yang mengakar dari generasi ke generasi. Budaya lokal yang kita kenal sarat dengan nilai-nilai adab dan kesopanan, religius, dan nuansa mistik. Menurut kamus Wikipedia, kebudayaan Indonesia didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang ada sebelum terbentuk bangsa Indonesia tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal berasal dari aneka ragam budaya suku-suku di Indonesia sebagai bagian terpadu kebudayaan Indonesia.

Derasnya arus globalisasi telah mengubah cara masyarakat kita dalam berbudaya. Perlahan tetapi pasti, budaya lokal mulai tergerus oleh budaya luar yang meng-hegemoni. Budaya negara-negara barat yang menganut paham kapitalisme itu tidak saja mengubah tatanan sosial yang ada, namun mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan pola pikir masyarakat kita. Budaya ini menumbuh-kembangkan konsumerisme dan hedonisme di segala lapisan masyarakat, laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, budaya lokal yang merupakan identitas yang kita miliki dan warisan para leluhur makin memudar, bahkan menghilang. Budaya tersebut kita kenal dengan istilah budaya populer (pop-culture).

Awalnya, budaya populer (budaya pop) bersifat massal (umum), komersial, terbuka, dan lahir dari rakyat, dan tentunya disukai rakyat. Sehingga budaya pop dikategorikan sebagai budaya rakyat (folk culture), atau budaya rendah (low culture). Bentuknya berupa musik, tarian, teater, gaya, ritual sosial, dan bentuk lain yang bersifat tradisional. Tumbuh pada tingkatan bawah (grass-root) sebagai perwujudan eksistensi dengan akses yang terbatas dan dicirikan dengan kesederhanaan. Oleh karena itu, budaya pop dapat disimpulkan sebagai produk kultural yang berasal dari rakyat bawah. Dalam tulisannya, Triyono Lukmantoro menyatakan, bahwa Folk culture sebagai budaya rakyat berawal dari konsep tentang rakyat pada zaman ketika produksi ekonomi dalam bentuk feodalisme. Sehingga, konsep folk culture akhirnya memang lebih dekat dengan produk kebudayaan yang berkarakter tradisional.

Ada low ada high. Ada budaya rendah, ada budaya tinggi. Kebalikan dari budaya rendah, yakni budaya tinggi (high culture), yang bersifat khusus dan tertutup, lahir dari kalangan atas (kaum elite). Budaya ini dianggap bernilai luhur dan adiluhung dan memiliki standarisasi yang tinggi (selera, kualitas, dan estetika). Contohnya, budaya rendah itu dangdut, dan budaya tinggi itu musik klasik (classical music), karena dangdut penikmatnya adalah kalangan bawah, sedang musik klasik penikmatnya kalangan atas.

Awalnya, kebudayaan tinggi dan rendah terpisah satu sama lain dan berdiri sendiri. Masing-masing tersekat dinding yang tinggi. Namun, dinding tersebut diruntuhkan budaya lain yang disebut budaya massa. Akhirnya, tidak ada batas antara budaya tinggi dan budaya rendah. Demikian Putu Wisnu Nugraha mengutip pendapat McDonald (1957; 60), bahwa budaya massa menyatukan massa ke dalam budaya tinggi yang telah diturunkan statusnya, kemudian menjelma menjadi instrumen dominasi politik.

Budaya Massa sebagai Budaya Populer

Menilik pengertiannya, maka budaya massa diartikan sebagai budaya komersial yang diproduksi secara massal. Hanya saja, tujuan utamanya yakni keuntungan (profit). Budaya pop meleburkan budaya rendah dan budaya tinggi. Dengan demikian, terjadi silangan (cross) kedua budaya. Produksi budaya rendah dinikmati kalangan tinggi, begitupun sebaliknya. Dalam perkembangannya, budaya massa akhirnya dipahami sebagai budaya populer.

Awalnya, budaya massa terbentuk oleh kebutuhan masyarakat akan hiburan. Melalui industrialisasi dan perkembangan teknologi, produsen budaya pop menciptakan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya merunut keefektifan (percepatan) dan keefisienan (kemudahan). Produsen budaya populer yakni negara-negara maju (kapitalis), dengan berbagai cara, berupaya menanamkan budaya itu di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara tidak langsung, terjadi kolonisasi budaya oleh negara-negara maju (barat) atas negara-negara berkembang.

Menurut Kasiyan dalam Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan (2008: 169), budaya massa sebagai produk-produk budaya relatif terstandar dan homogen, seperti barang-barang maupun jasa; dan pengalaman-pengalaman budaya yang berasosiasi dengannya; dirancang untuk merangsang kelompok terbesar (massa) dari populasi masyarakat (1991). Melihat rumusan itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa produsen budaya pop mengabaikan kenyataan masyarakat yang heterogen.

Masih mengutip sumber yang sama, kata kunci yang pengaruhnya signifikan dalam kaitan keberadaan budaya massa zaman modern, yakni menyangkut dua hal pokok: "media massa" dan "kapitalisme".

Pertama, soal media massa. Zaman ini, media massa menjadi aspek sentral dalam hegemoni budaya populer. Pengaruhnya luar biasa besar di masyarakat. Sebut saja televisi, koran, majalah, radio, internet, dan lainnya. Media massa tersebut begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat di akses dengan mudah. Melalui media massa itu, sekat-sekat antar belahan dunia menjadi hilang. Dengan media massa, masyarakat dapat melihat, mendengar, dan mengonsumsi informasi dari segala penjuru dunia. Dimensi ruang dan waktu seakan mengciut. Budaya meniru dan budaya konsumerisme semakin berkembang. Sehingga, nilai-nilai budaya lokal makin terkikis bahkan terancam punah.

Sebagai contoh, televisi. Televisi merupakan produk budaya pop yang pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Melalui televisi, masyarakat kita mulai meniru berbagai hal: gaya berbahasa, gaya berbusana, gaya hidup, dan pola pikir. Dampaknya, terjadi perubahan sosial di masyarakat dan esensi nilai-nilai budaya lokal lenyap.

Kedua, soal kapitalisme. Tentang kapitalisme, kita memahaminya sebagai penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik modal, dan diproduksi semaksimal mungkin untuk

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Paham ini dikembangkan negara-negara maju (barat) melalui industrialisasi. Massal-isasi produksi industri tentu dibarengi dengan konsumsi massal, sehingga diperoleh profit maksimal. Melalui media massa, produk tersebut gencar ditanamkan di negara-negara berkembang. Masyarakat dijadikan konsumen (pemakai) produk industri kapitalis. Secara tidak sadar, budaya konsumerisme dan hedonisme (mengejar kepuasan) tumbuh subur di Indonesia.

Akhirnya, budaya massa atau budaya pop dipahami sebagai sebuah budaya yang menurunkan level selera masyarakat dan menurunkan kualitas peradaban. Dengan bentuknya yang lebih canggih, lebih halus, dan lebih nikmat, berhasil menjerat pasar potensialnya.

Perempuan Target Potensial

Dibahas sebelumnya, budaya pop menumbuhkan budaya konsumerisme dan hedonisme pada berbagai kalangan, perempuan maupun laki-laki.

Perempuan Indonesia yang sebagian besar bekerja di wilayah domestik dimanfaatkan secara optimal oleh para produsen kapitalis. Dengan media massa yang ada, perempuan Indonesia dijerumuskan kedalam budaya konsumerisme dan hedonisme. Perempuan sebagai manajer keuangan di banyak rumah tangga tentunya mulai mengadaptasi berbagai hal, seperti gaya hidup (life style) sampai pola pikir. Pengaruh terbesar televisi nyata dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai media hiburan. Selain sebagai pengatur keuangan rumah tangga, dianggap kebutuhan pribadi perempuan dinilai lebih banyak dan beragam daripada laki-laki, seperti kosmetik, pakaian, sepatu.

Mengutip tulisan Nina M. Armando berjudul "Menjadi Pembelanja yang Boros", makin majunya pendidikan perempuan, maka produk-produk masa lalu yang ditargetkan untuk laki-laki, sekarang berpotensi besar ditargetkan pada kaum perempuan. Perempuan bukan hanya memerlukan informasi tentang barang-barang konsumsi sehari-hari, misalnya perabot rumah tangga dan alat-alat kecantikan, melainkan produk-produk: otomotif,

jasa perbankan, program-program pendidikan, real estate, transportasi udara, pariwisata, dan sebagainya. Dengan berbagai kebutuhan itu, perempuan merupakan pasar potensial produk-produk budaya populer.

Secara sadar dan tidak sadar, perempuan jadi korban. Oleh karena, melalui konsep tersebut perempuan diajarkan untuk menjadi pembelanja yang didorong oleh logika dan keinginan daripada kebutuhan. Namun banyak diantaranya menerima begitu saja perubahan sosial ini sebagai proses yang harus dijalani dan dimaklumi tanpa dikritisi. Karena mereka dihadapkan dalam dua pilihan, menerima (tidak ingin dianggap ketinggalan zaman) atau menolak. (IK)

Sumber bacaan:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
2. Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan_Indonesia
3. Lukmantoro, Triyono, "Bahasa dan Budaya Populer" dalam: Suara Merdeka Edisi Selasa 4 November 2003. Diambil dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0311/04/kha1.htm>
4. Nugraha, Putu Wisnu, "Dari Dunia "Wayang" sampai "Telenovela", Sebuah Refleksi Budaya Massa dan Budaya Populer Kekinian". Dalam Bali Post Edisi 15 September 2002. Diambil dari <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2002/9/15/ap1.html>
5. Kasiyan, "Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan". Cetakan 1. Yogyakarta, Ombak, 2008.
6. Ibid. hlm. 180.
7. Armando, Nina M, "Menjadi Pembelanja Yang Boros". Dalam Jurnal Perempuan "Remaja Melek Media". Edisi 37, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.

Judul	: Hidup Bagaikan Mengalirnya Sungai: Wanita dalam Perjuangan Anti-kolonial Malaya
Judul Asli	: Life As The River Flows: Women in the Malayan Anti-colonial Struggle
Penyusun	: Agnes Khoo
Penerjemah	: Oey Hay Djoen
Penerbit	: Hasta Mitra
Tahun	: 2007
Tebal	: 378 Halaman



PEREMPUAN YANG MENEGAKKAN SEJARAH!

Berbicara mengenai komunisme, tentu dalam benak kita terbayang soal PKI. Dan bicara tentang PKI, yang terpikirkan adalah peristiwa September 1965, kemudian dikenal dengan G30S/PKI. Apa yang melekat dalam benak kita mengenai PKI hingga kini? Kekejaman dan perbuatan sadis mereka. Paling tidak, itulah pandangan sebagian masyarakat awam.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan PKI dianggap ‘musuh negara’ sampai kini. Begitu juga dengan Gerwani, organisasi kaum perempuan yang berkaitan dengan PKI. Didirikan pada tahun 1950-1954, bercita-cita melaksanakan revolusi Indonesia. Pasca peristiwa 30 September 1965, terjadi pembunuhan massal terhadap anggota maupun yang berkaitan dengan PKI. Anggota Gerwani banyak yang ditangkap, diperkosa, dan dipenjarakan tanpa pernah diadili. Bahkan, disebarkan kebohongan publik bahwa Gerwani tidak lebih dari wanita komunis yang jalang dan keji.

Doktrin disebarluaskan melalui film G30S/PKI karya sutradara Arifin C. Noer yang di putar setiap tanggal 30 September pada masa Orde Baru berkuasa. Secara tak sadar, benak kita dicekoki bahwa komunis itu kejam layaknya ‘tukang sembelih’ dan Gerwani adalah perempuan komunis yang membunuh jenderal-jenderal di Lubang Buaya sambil menari-nari telanjang. Sehingga PKI dan Gerwani ‘halal’ untuk dibunuh, disiksa, dan diperkosa.

Akan berbeda realitasnya bila kita memahami sejarah Indonesia dengan baik dan benar. Jelas Gerwani adalah organisasi perempuan yang berjuang memerdekakan Indonesia dari kolonisasi dan pemiskinan sosial-ekonomi-politik, dan budaya

masyarakat. Justru politik Orde Baru berusaha menghapuskan kenyataan sejarah itu. Dengan demikian, para perempuan yang tergabung dalam Gerwani mengalami stigmasasi dalam berbagai dimensi (sosial-ekonomi-politik-budaya).

Potret serupa terjadi pada perempuan mantan gerilyawan Partai Komunis Malaya (PKM). Perjuangan mereka melawan kolonial dan sumbangsih bagi kemerdekaan justru dihilangkan dari teks sejarah Malaya. Yang dilekatkan, justru partai mereka ‘terlarang’. Sehingga, setelah negara Malaya merdeka, anggota atau yang berkait dengan PKM ditangkap dan di usir.

Siapa itu PKM? Mengapa orang komunis dinyatakan sebagai “teroris bertanduk dua?” Mengapa pemerintah begitu cemas dan takut pada mereka? Pertanyaan sederhana namun menggelisahkan dan buat penasaran Agnes Khoo (sosiolog yang terlibat sebagai peneliti, aktivis, pekerja NGO dengan isu gender, perburuan, serta lingkungan hidup).

Jawaban atas kegelisahan itu akhirnya tertuang dalam bukunya yang berjudul “Hidup Bagaikan Mengalirnya Sungai”. Buku ini membeberkan fakta sejarah yang dihilangkan selama ini. Penyusunannya memakai metode sejarah lisan, yakni menggali data dari 16 perempuan mantan gerilyawan PKM yang tinggal di empat “kampung perdamaian” PKM di bagian Selatan Thailand. Dalam buku ini, terlukis jelas peran yang dimainkan perempuan PKM selama 40 tahun perang gerilya di semenanjung Malaya-Thailand.

Kalau kita telusuri buku ini, kita ketahui bahwa kebanyakan perempuan PKM, yang beretnik Cina maupun Malaya, hidup sebagai kelas bawah dan

dekat dengan kekerasan. Kisah yang dituturkan ke enam belas perempuan tersebut tak hanya sukses melukiskan suka duka bergerilya di hutan, pun juga alasan mereka bergabung dengan PKM serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru pasca peperangan. Menurut Agnes Khoo, buku ini bagai menyingkap lukisan sejarah yang berwarna-warni dan sangat kaya pengalaman sepanjang hayat yang dibuat kaum perempuan tiga generasi.

Yang menarik dari buku ini, keenam belas perempuan itu dilahirkan dan besar di kawasan sempadan Thailand-Malaysia, namun menjadi anggota PKM, berjuang demi kemerdekaan Malaysia dan Singapura. Mereka menyumbangkan seluruh masa remajanya yang berharga untuk perjuangan anti-Inggris dan perjuangan melawan tentara Jepang dan kemerdekaan di Malaysia dan Singapura.

Menentang feodalisme dan patriarkhal juga alasan utama mereka jadi anggota PKM. Sebagian besar perempuan ini adalah korban tindak kekerasan dan ketidakadilan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun pemiskinan dan penindasan kolonial. Mereka turut berjuang demi revolusi dan pembebasan kaum perempuan di negerinya.

Seperti kisah tuturan Suria (alias Atom), ia bergabung dengan PKM atas kehendaknya sendiri. Hidupnya yang berkubang kemiskinan, pengalaman tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ayahnya terhadap ibu dan dirinya sendiri, juga jadi pemicunya. Menikah di usia 14 tahun, dan akhirnya mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun setelah bergabung dengan PKM, Atom menemui bahwa PKM amat baik dan berperang untuk pembebasan Malaysia.

"PKM amat baik terhadap kami. Mereka menerangkan banyak hal kepada kami, mengajar kami sejarah Malaya dan memberitahu kami sebab kami berperang. Mereka menjamin bahwa PKM tidak berniat Thailand. PKM cuma hendak membebaskan Malaya."

Ia menuturkan sulitnya hidup bergerilya di hutan, namun menemukan kebebasannya di sana. Ia tak menyesali pilihan hidupnya bergabung dengan pasukan. Bahkan selama di hutan, ia belajar membaca dan menulis. Di hutan, perempuan dan laki-laki diberi tugas dan kerja yang sama. Menurutny, perempuan itu lebih

gagah daripada lelaki, karena bisa melakukan apa saja dan lebih tahan susah. Mereka dapat memasak, bercocok-tanam, berburu, dan bertempur. Sebagai perempuan, ia tidak merasa kehidupan sebagai pasukan lebih sengsara daripada hidup normal. Pasukan PKM tidak mengganggu dan tidak memandang rendah perempuan.

Sama halnya dengan Huang Xue Ying, tuturnya sejumlah perempuan lebih gagah daripada kawan lelaki. Lebih tahan susah. Huang Xue Ying jadi bidan semasa di pasukan. Ia berhasil membantu persalinan dua puluh bayi kawan perempuannya. Ia bergabung karena tahu orang-orang PKM baik. Keluarganya sangat miskin sehingga tak ada peluang untuk sekolah. Selama bergabung, PKM mengajarkan banyak hal. Walaupun pilihan hidup yang diambilnya amat berat dan ditentang keluarga, tapi demi revolusi Xue Ying berani melarikan diri dari rumah. Sekarang, tiada ada kata menyesal telah bergabung dengan pasukan. Xue Ying tidak merasa bahwa dirinya pahlawan. Ia bangga dengan sejarah hidupnya sendiri.

Itulah sekelumit kisah yang termuat dalam buku yang menarik ini. Mereka semua merelakan masa remajanya untuk pembebasan negerinya dari penjajahan. Namun demikian, perjuangan mereka memerdekakan negerinya dihilangkan dari sejarah. Mereka seperti "dipaksa" mengakui bahwa kemerdekaan negeri diperoleh secara damai. Itu semata-mata berkat perundingan dan keterampilan diplomatik pemerintahan dan kemurahan hati kolonial Inggris. Kenyataan sejarah justru disembunyikan, bahkan diputarbalikan semena-mena.

Kata Agnes Khoo, kisah mereka adalah bagian penting "sejarah rakyat" yang selama ini ditindas dan dibungkam oleh "sejarah negara (resmi)". Sejarah negara cuma menyebut sejarah yang "resmi". Dan sejarah para perempuan dalam buku ini dihapus oleh sejarah resmi negara. Mereka terbungkam membisu dalam masyarakat yang resmi. Sesungguhnya, merekalah lembaran lain sejarah Malaysia, Singapura, dan Thailand yang dihilangkan. (IK)

Judul : *Memoirs of a Geisha*
 Sutradara : Rob Marshall
 Aktor/Aktris : Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Michelle Yeoh dan Gong Li
 Penerbit : Columbia Pictures

Durasi : 120 menit

CINTA SEJATI GEISHA

Di suatu perkampungan nelayan miskin, tahun 1929, Satsu dan Chiyo (kakak beradik) dijual oleh orangtuanya yang miskin kepada pemilik Okiya (geisha house). Malangnya Chiyo harus terpisah dengan Satsu, karena Satsu (kakaknya) dijual ke sebuah rumah bordil. Mulailah Chiyo kecil hidup di Okiya di tengah Gion perkampungan geisha Kyoto yang berada di balik lembah sempit.

Selama bekerja di Okiya, Chiyo diperlakukan dengan kasar, bahkan kerap dipukuli dan disiksa. Karena tak tahan lagi, ia dan sang kakak pun berencana untuk kabur. Rencana kabur Chiyo dan kakaknya hanya satu kesempatan, jika mereka tidak bisa bertemu pada tempat yang telah disepakati, maka kakak beradik itu tidak bisa bertemu untuk selamanya. Namun sayang, mereka gagal bertemu kembali di tempat tujuan yang sudah ditentukan, karena Chiyo berhasil tertangkap dan segera dikembalikan ke rumah geisha itu.

Chiyo kecil (Zhang Ziyi) hidup prihatin di Okiya. Chiyo melakukan pekerjaan rumah dan harus bersekolah untuk belajar seni geisha berupa tari, musik, cara memakai kimono, cara berhias dan manata rambut bersama teman kecilnya Pumpkins. Chiyo pun sedikit demi sedikit mulai mengenal dunia geisha dari Hatsumomo (Gong Li) seorang geisha cantik bertempramen buruk.

Di sebuah jembatan, Chiyo kecil duduk merenungi nasib hidupnya yang telah ditinggal pergi kedua orangtuanya dan hidup sebatang kara. Tiba-tiba seorang pria mendekatinya yang didampingi dua orang geisha. Pria ini adalah



Chairman (Ken Watanabe). Chairman dengan senang hati menghiburnya dan membelikan es krim serta menghadaiahkan saputangan miliknya. Dengan sikap Ken yang ramah, Chiyo mulai jatuh hati dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi geisha-nya.

Dengan berjalannya waktu, impian Chiyo menjadi kenyataan saat saingan Hatsumomo, yaitu geisha terkenal bernama Mameha (Michelle Yeoh) datang dan meminta Chiyo kepada Nitta (pemilik Okiya) untuk dijadikannya murid. Mameha bertaruh dalam waktu enam bulan ia sanggup menjadikan Chiyo sebagai geisha terkenal. Mameha pun mengajarkan semua teknik yang ia miliki dan yang diperlukan untuk menjadi seorang geisha sejati. Mulai dari menari tarian tradisional (tachikata),

bernyanyii (jikata), memainkan shamisen (kecap khas Jepang), merangkai bunga, mengenakan kimono, mengerti tata cara seremonial minum teh secara formal, serta melayani tamu dengan cara-cara yang sangat sopan dan beretiket. Tak hanya itu, Mameha pun mengganti nama Chiyo yang sudah cukup dewasa (diperankan Zhang Ziyi) menjadi Sayuri.

Sayuri pun tumbuh menjadi seorang geisha yang sangat sukses hingga membuat geisha lain, termasuk Hatsumomo, dengki dan iri hati. Meski segala cara dilakukan oleh Hatsumomo, namun tetap tak berhasil menjatuhkan Sayuri. Sampai suatu saat, Sayuri berjumpa kembali dengan Iwamura Ken, dan ia pun ditaksir oleh para kolega dekatnya.

Mameha mengajarkan Chiyo trik melukai dirinya sendiri dengan menggores pisau sepanjang kira-kira 5 cm pada paha kanan nya. Luka ini dimaksudkan Mameha untuk menarik perhatian Dr. Crab yang akan dimintai merawat luka Chiyo. Dr. Crab adalah pria yang paling dikenal sebagai penawar tertinggi mizuage (keperawanan) seorang geisha.

Setelah perawatan luka itu, Chiyo (Sayuri) tampil tunggal dalam pementasan tari disaksikan banyak pembesar yang di antaranya Chairman, Nobu, dan Dr. Crab. Sayuri pun menjadi bintang dalam sebuah pesta taman yang diadakan Nobu direktur perusahaan Iwamura Electric. Di pesta ini Sayuri disambut oleh Chairman (rekan Nobu) yang mengajaknya berjalan di taman. Percakapan sejenak Sayuri dan Chairman dibawah mekarnya bunga Sakura seakan-akan merupakan salah satu detil menarik yang merayakan pertemuan Sayuri dengan Chairman yang diam-diam dikaguminya. Dan bergugurannya bunga Sakura seakan menandakan kesukacitaan ini tampaknya. Sebagai tanda perhatiannya Chairman mengambill bunga Sakura yang tersangkut di rambut Sayuri.

Sebagai geisha terkenal, Sayuri ternyata berhasil menarik minat Dr. Crab yang berani membayar sejumlah 15.000 yen untuk keperawannya (mizuage), suatu harga tertinggi yang diterima

seorang geisha saat itu. Berkat kesuksesannya itu, ia tidak hanya dapat melunasi utangnya selama menjadi pembantu namun ditunjuk sebagai pewaris Ibu Nitta, sang pemilik rumah geisha itu.

Hal ini membuat Hatsumomo menjadi cemburu dan iri hati. Oleh karena itu Hatsumomo sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Sayuri. Hatsumomo memasuki kamar Sayuri dan menemukan sebuah sapu tangan berinisial nama seorang pria.

Sapu tangan ini sangat berarti bagi Sayuri karena mengingatkannya kepada seorang pria yang pernah dijumpainya pertama kali di sebuah jembatan saat kecil. Ia sedang duduk merenungi nasib dirinya yang telah ditinggal pergi oleh kedua orangtuanya, merenungi nasib hidupnya yang tinggal sebatang kara.

Pertemuan Chiyo dengan Chairman inilah yang menumbuhkan kepercayaan dirinya sehingga lebih menguatkan tekadnya untuk menjadi geisha. Chiyo ingin menjadi geisha sebagai batu loncatan dalam hidupnya.

Mengetahui Hatsumomo memasuki kamarnya, Sayuri meminta Hatsumomo keluar, namun Hatsumomo menemukan sapu tangan kenangannya dan mengambilnya serta akan membawanya. Ini membuat Sayuri tampak marah, dengan berusaha merebut kembali sapu tangannya.

Konflik pun tak bisa di cegah lagi. Sayuri menyerang Hatsumomo hingga menjatuhkan sebuah lampu tempel yang berada di atas meja dan menyebabkan lantai terbakar. Bukannya mencoba memadamkan api, sebaliknya Hatsumomo menjadi bertambah kemarahannya dan mengambil dua buah lampu tempel dan memecahkannya ke lantai sehingga okiya pun terbakar.

Puncak konflik ini, Hatsumomo di usir dari okiya. Sayuri menatap kepergian Hatsumomo dari balik pecahan jendela okiya di lantai dua dengan tidak menampakkan dendam. Hatsumomo terusir dan untuk terakhir kalinya Hatsumomo memandang lagi okiya yang telah sekian

lama menjadi rumah tinggalnya dan kini harus ditinggalkannya untuk selamanya.

Sayuri semakin terkenal sebagai geisha di Kyoto. Sayang puncak prestasinya ini harus terhenti sejenak karena pecahnya Perang Dunia II dan okiya terpaksa harus ditutup. Namun Sayuri mengungsi dengan selamat karena bantuan

Nobu yang adalah pelanggannya. Chairman (rekan Nobu) yang mengatur perjalanannya dan memastikannya selamat sampai ke tujuan.

Setelah Perang Dunia kedua berakhir, Nobu kembali menemui Sayuri dan meminta bantuannya untuk menarik perhatian Derrick, tentara AS calon investornya. Namun Nobu sempat kecewa setelah mengetahui Sayuri ternyata menolak memberikan perhatian lebih kepada Derrick. Oleh karena itu, untuk membayar kecewaan Nobu ini, Sayuri secara diam-diam meminta bantuan Pumpkins agar Derrick menemui dirinya di kamar pukul 9 malam. Sayuri berharap Mameha, Chairman dan Nobu yang sedang bercengkrama di taman tidak mengetahui peristiwa ini.

Tetapi Pumpkins yang mengetahui betapa dalamnya perasaan Sayuri kepada Chairman membocorkan kejutan Sayuri yang berniat menyerahkan segalanya kepada Derrick karena Nobu. Perbuatan Sayuri pun di ketahui Chairman dan membuatnya kecewa.

Akhir cerita film ini, Sayuri mendapat undangan menemui seseorang di sebuah taman. Sayuri pun menunggu dengan dandanan dan kimono cantik. Matanya memandang ke dalam kolam bening di mana daun Sakura berjatuhan satu per satu, wajahnya begitu bersinar dan tampak cantik di pagi itu.

Tanpa diduga, ternyata tamu yang di temuinya adalah pria pujaan hati Sayuri yaitu Chairman. Sayuri menjadi terkejut dengan setengah tak percaya. Pria idamannya berada di depan matanya. Chairman yang berharap dirinya belum terlambat untuk bisa diterima hatinya oleh Sayuri berkata, "Apakah engkau tak ingin aku menatap wajahmu?" Dan, Sayuri membalikkan wajahnya

serta berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa setiap langkah perjalanan hidupku, bahkan saat aku menghela napasku diriku melangkah semakin mendekat kepadamu?". Mereka berdua berjalan menuju kolam di taman dan tampak berjalan serasi berbincang dengan bahagia.

Melihat film ini memang agak sulit membedakan antara geisha dengan prostitusi, karena seorang Geisha pun bisa terjerumus praktik prostitusi apabila seorang geisha meninggalkan nilai-nilai yang harus diterapkan seorang geisha seperti yang di lakukan Hatsumomo. Pada adegan-adegan tertentu film ini ada aktifitas geisha ditampilkan sebagai pekerja seni atau penghibur dengan keahlian yang telah di pelajarnya, seperti menari, merangkai bunga, menyajikan teh dan lainnya untuk menyenangkan tamunya. (RK/NE)



LEMBAR ISIAN
PEMBACA BULETIN PEREMPUAN BERGERAK

Nama anda :
Organisasi anda :
Alamat lengkap :

1. Berapa sering Anda membaca bulletin Kalyanamitra sebelumnya?

2. Apa nama bulletin Kalyanamitra sebelumnya? Apakah anda pernah berlangganan?

3. Secara umum, bagaimana pendapat Anda mengenai bulletin Kalyanamitra ini?

4. Informasi apa yang menurut Anda penting diperoleh dari bulletin Kalyanamitra?

5. Menurut anda, apakah isu yang digarap dalam bulletin ini menarik dan aktual?

6. Apakah bulletin ini benar-benar bermanfaat bagi Anda?

7. Beri penilaian berikut:

- keseluruhan isi:
- keseluruhan layout dan desain:
- panjang tiap artikel:
- kemudahan konsep yang disampaikan:
- keseluruhan ilustrasi/foto-foto:

8. Menurut Anda, apa topik menarik ke depan yang perlu dibahas bulletin Perempuan Bergerak?

9. Berapa usia anda?

10. Dalam bidang apa lembaga Anda bergerak?

11. Apakah Anda ingin berlangganan?

Untuk kolom langganan, isilah formulis berikut:

Nama :

Organisasi :

Alamat lengkap :

Jumlah edisi dan eksemplar yang dibutuhkan :

Ongkos cetak dikirimkan ke Bank BUKOPIN No. Rek: 0103034652 atas nama
Rena Herdiyani

Harap lembar isian pembaca buletin Perempuan Bergerak ini dikembali
ke alamat berikut:

Kalyanamitra
Jl. Kaca Jendela II No.9 Rawajati, Kalibata, Jakarta
12750, Indonesia

Atau

Faksimili (021) 7902112

Elegi Perempuan
Oleh Kirana Kejora

Perempuan itu terhina
Dengan tetes air mata
Yang menjadi buliran peluh duka
Menggarami lukanya
Yang masih memerah
Basah terkucur air sang buah jeruk nipis
Membuat dukanya makin miris
Melengkapi renda gaunnya yang kian tipis

Perempuan sering tervonis
Tempat salah iris
Pembuat dosa tragis
Pelaku bodoh yang terkikis
Meski banyak
Yang begitu memujanya
Sebagai surga cinta ternikmat
Perengkuh hasrat
Pemuas nafsu yang memiliki hawa syahwat!

Dunia manusia tak pernah adil!
Semua terasa ganjil!
Namun aku tak kan pernah mau jadi sang kerdil!
Karena aku kan terus menggapai DIA! Sang Pemilik
Adil!

Kumpulan Puisi Politik
Oleh Andrinof A Chaniago

Ludah yang kering
Lihatlah!
masih adakah hati yang berisi?
ketika logika sudah berbau terasi
ketika nurani kian ter-erosi..
di kilatan hujan pesona yang tidak kunjung basi

Lihatlah!
Dendang-an birokrat dan wakil berdasi..
penuh kegiatan sinetron mengejar kursi
Ketika tikus sibuk pesta korupsi
kucing justru giat pamer gusi...
terbuai diempuknya jok mercy

Lihatlah!
Gempita riuhnya demokrasi
menumbuhkan nurani yang semakin membesi
saat Rakyat butuh nasi..
namun justru di kremasi

Ah, sudahlah!
ini bukan Demonstrasi. .
ini juga bukan mosi...
ini hanyalah puisi...
dari yang hidup namun sesungguhnya mati!

Nirwana Cinta Selamanya
Oleh Kirana Kejora

Perempuan itu menyipukan malunya dengan senyum
Dan berkata kepada kekasihnya
"Lelaki adalah elang, pantang baginya buat mundur!
Inginku, jadilah engkau elang yang bukan pemangsa
Namun elang sang dewa angin
Yang siap meminangku sang dewi bhumi"

Kemudian sang lelaki menjawab
Begini,
"Perempuan adalah eidelweis, pantang baginya
menangis
Tegar kelopakmu yang tetap menyimpan
kelembutan
adalah lambang keabadian abdimu kepadaku"

Setelah mantra hati mereka termantap
Dalam sebuah kitab
Perempuan dan lelaki itu menikah

Abadilah cinta kita, tersimpan selamanya
Dalam hati DIA Sang Pemilik Abadi
Begini,
Kalimat surga perempuan dan lelaki itu di atas
pelaminannya

(IH)



Perempuan bergerak menuju **PERUBAHAN**

Untuk Kemajuan, berdaulat!
dan Hidup **LEBIH BAIK...**!